

**PEMBERITAAN DUGAAN KASUS KORUPSI SURYADHARMA  
ALI DALAM SURAT KABAR HARIAN KOMPAS DAN SINDO  
(ANALISIS FRAMING)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**

Oleh:

Achmad Khoirul Anam

081211002

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp: 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

**Kepada.**

Yth. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Achmad Khoirul Anam  
NIM : 081211002  
Fak./Jur. : Dakwah dan Komunikasi / KPI  
Judul Skripsi : **PEMBERITAAN KASUS KORUPSI SURYADHARMA ALI  
DALAM SURAT KABAR HARIAN KOMPAS DAN SURAT  
KABAR HARIAN SINDO (ANALISIS FRAMING)**


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

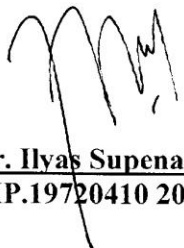
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 15 Juni 2015

Bidang Substansi Materi

Pembimbing,  
Bidang Metodologi & Tata Tulis

  
**Ahmad Faqih, S.Ag, M.Si.**  
NIP. 19730308 199703 1004

  
**Dr. Ilyas Supena, M.Ag**  
NIP.19720410 200112 1003


**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PEMBERITAAN DUGAAN KASUS KORUPSI SURYADHARMA A.I.  
DALAM SURAT KABAR HARIAN KOMPAS DAN SURAT KABAR  
HARIAN SINDO (ANALISIS FRAMING)**


Disusun Oleh  
**Achmad Khoirul Anam**  
081211002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 22 Mei 2015  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

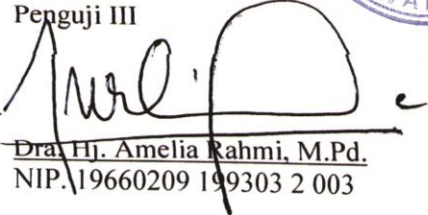
Bidang Substansi Materi

  
**Ahmad Faqih, S.Ag, M.Si.**  
NIP. 19730308 199703 1004


Pengujian I

  
**Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.**  
NIP. 19760407 200112 1003

Pengujian III


  
**Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd.**  
NIP. 19660209 199303 2 003

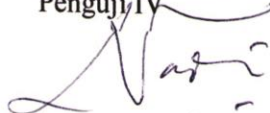
Pembimbing,  
Bidang Metodologi & Tata Tulis

  
**Dr. Ilyas Supena, M.Ag**  
NIP. 19720410 200112 1003

Susunan Dewan Penguji

Pengujian II

  
**Ahmad Faqih, S.Ag, M.Si.**  
NIP. 19730308 199703 1004  
Pengujian IV

  
**Nadiatus Salama, M.Si.**  
NIP. 19780611 200801 2 016



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.



Semarang, 2015

*Achmad Khoirul Anam*  
Achmad Khoirul Anam  
NIM: 081211002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat, taufiq serta hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I). Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari era kegelapan menuju jalan yang diridhai Allah (Amin).

Saya sebagai manusia biasa, sudah menjadi kodratnya tidak dapat lepas dari kesalahan, kekeliruan dan kekurangan. Dalam penyusunan skripsi ini pun, penulis tidak mungkin bisa menyelesaikannya tanpa adanya orang lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kepada:

1. Pror. Dr. H. Muhibbin, M.A, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
3. Ahmad Faqih, S.Ag, M.Si., selaku pembimbing I dan Dr. Ilyas Supena, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Para dosen dan Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang.
5. Ibunda dan Ayahanda tercinta, kalian adalah motivator sejati, support materiil dan immaterial mereka selama ini membuat perjalanan hidup penulis lebih berarti dan sempurna.
6. Adekku Yusuf tersayang, Sulis.
7. Agustin Empret, terimakasih atas rasamu, kegilaanmu, dukungan, perhatian, kepercayaan, bantuan, serta kesabaranmu selama menemaniku.
8. Pak Lek, Bu Lek, Pak De dan Bude, Sepupuku yang selalu memberiku semangat dan do'a sehingga menjadikan hidupku penuh warna.
9. Teman-teman di LPM MISSI. Dari para senior, Mas Joko, Mbak Umi, Rustam Aji, Mbah Ozy, Mas Hasyim, Mbak Novi, Teguh Wb, Gandul,

Esta, Risa, Ardi, Icha, Kadenk, Oglek, Jibril, Om toet, Sar-X, Tukli, Krewo, Safitri, Faridut, Ria, Kiki, Ririn, Tintin, Nika, Eka, Dafi, Syamsul.

10. Semua Teman KPI 2008, khususnya buat Agus Man, Lutfi, Muhadi, Amin, Elly Kreo, Pupun, Andre.
11. Teman-teman Wadas, Asenk, Toyenk, Adib BB, Rohman, Darsono, Shanty, Yuda, Baydowi, Taqy, Centini, Heboh, Umar, Sodiq, Maksunah, Jumianto, Ambon, Sari, Siro dan semua manusia PKM.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Atas jasa-jasa mereka penulis hanya mampu memberikan do'a semoga semua kebaikan dan amal ibadah mereka senantiasa diridhoi Allah SWT, mendapat pahala dan keselamatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Dan saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik atas kesalahan-kesalahan dalam penulisan ini, dan saya ucapkan terima kasih.

Semarang, 2015

Penulis

Achmad Khoirul Anam

## PERSEMBAHAN

Puji syukur Alahamdulillah saya panjatkan kehadiran illahi rabbi yang mana dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

- ♥ Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak Sutimin dan Ibu Siti Zaroh), terimakasih atas semua yang telah engkau berikan kepada anakmu ini yang takkan pernah mampu aku membalasnya. Berkat cinta, kasih sayang dan doa kalian Allah selalu melimpahkan berjuta kenikmatan yang tiada terkira untukku. Kata-kata tak akan pernah sanggup untuk mengungkapkan rasa sayang dan terimakasihku pada kalian.
- ♥ Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, begitu banyak ilmu yang penulis dapat darimu.
- ♥ Kubisikkan juga skripsi ini untuk Agustin Empret, terimakasih atas rasamu, dukungan, perhatian, kepercayaan, bantuan, serta kesabaranmu selama menemaniku.

Achmad Khoirul Anam

**MOTTO**

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

**“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Surat Al-Baqarah ayat 282.**



## ABSTRAKSI

**Achmad Khoirul Anam (081211002).** Pemberitaan Kasus Korupsi Suryadharma Ali Dalam Surat Kabar Harian Kompas dan Sindo (Analisis Framing), Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Latar belakang masalah penelitian ini berangkat dari perintah bagi umat islam untuk selektif ketika datang sebuah berita, agar tidak tersesat dalam kepentingan yang merugikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bagaimana konstruksi berita kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi yang dilakukan oleh Suryadharma Ali, dalam pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Sindo.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah intensitas pemberitaan kasus tersebut, Koran Sindo lebih sedikit mengeluarkan berita dibanding dengan Kompas. Konstruksi yang berbeda terlihat jelas dalam setiap pemberitaan dan fakta-fakta yang ditampilkan dalam berita.

Framing (bingkai) kedua media Kompas dan Koran Sindo dari beberapa berita yang diteliti, menunjukkan arah kecenderungan dan konstruksi fakta yang berbeda. Kompas mengkonstruksikan berita, kaintannya dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012/2013. Suryadharma Ali adalah tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012/2013, SDA harus segera melepaskan jabatannya sebagai Menteri Agama guna untuk memperlancar proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suryadharma masih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meskipun statusnya menjadi tersangka dugaan kasus korupsi, suryadharma ali ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kompas dalam mengonstruksikan berita sebagaimana yang dilihat dari struktur retorik selalu memberikan penekanan dalam setiap beritanya, baik itu dalam kata "Suryadharma Terkejut", "Suryadharma Belum Mau Lepas Jabatan", "Suryadharma Ali Tetap Ketua Umum PPP". Maupun berbentuk foto berita yang menunjukkan ekspresi marah Suryadharma saat ditahan KPK.

Berbeda dengan Kompas, Koran Sindo mengkonstruksikan pemberitaan yang seolah menunjukkan bahwa Suryadharma Ali (SDA) bukan satu-satunya tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013. SDA belum pasti bersalah, karena pemberitaan Sindo hanya berhenti pada proses Praperadilan dan pemberitaan penahanan SDA oleh KPK tidak dimunculkan. Struktur retorik, Koran Sindo lebih sering menggunakan kata yang mendukung SDA, seperti pada judul "SDA tuntutan KPK Rp1 triliun" yang menjelaskan bahwa penetapan SDA sebagai tersangka karena unsur politik karena telah mendukung Calon Presiden Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014, serta tidak memiliki bukti yang kuat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian .....	8
1.4. Tinjauan Pustaka .....	8
1.5. Metode Penelitian .....	13
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
<b>BAB II. MEDIA DAN PEMBERITAAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA</b>	
2.1. Tinjauan Tentang Pemberitaan dan Media Massa .....	17
2.1.1. Pengertian dan Fungsi Media Massa .....	17
2.1.3. Teori Konstruksi dalam Media .....	19
2.1.4. Pengertian dan Jenis Berita .....	25
2.2. Tinjauan Tentang Korupsi Di Indonesia .....	27
2.2.1. Pengertian Korupsi .....	27

2.2.2. Fenomena Korupsi Di Indonesia .....	30
--	----

**BAB III. GAMBARAN UMUM SKH KOMPAS DAN SINDO SERTA DATA  
PEMBERITAAN KASUS KORUPSI SURYADHARMA ALI**

3.1. Gambaran Umum Harian Kompas .....	34
3.1.1. Sejarah dan Ideologi Harian Kompas.....	34
3.1.2. Visi dan Misi .....	39
3.2. Gambaran Umum Harian Sindo .....	42
3.2.1. Sejarah Harian Sindo.....	42
3.2.2. Visi dan misi.....	45
3.3. Pemberitaan Kasus Korupsi Suryadharma Ali Di SKH Harian Kompas dan Sindo.....	45

**BAB IV. ANALISIS PEMBERITAAN KASUS KORUPSI SURYADHARMA  
ALI DALAM SURAT KABAR HARIAN KOMPAS DAN SURAT  
KABAR HARIAN SINDO**

4.1. Analisi Framing Berita Suryadharma Ali Pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi Mei 2014-April 2015 .....	51
4.1.1. Frame Kompas, 23 Mei 2014 .....	51
4.1.2. Framing Kompas, 24 Mei 2014 .....	54
4.1.3. Framing Kompas, 28 Mei 2014 .....	55
4.1.4. Frame Kompas, 12 Juni 2014 .....	57
4.1.5. Frame Kompas, 1 April 2015 .....	58
4.1.6. Frame Kompas, 11 April 2015 .....	61
4.2. Analisi Framing Berita Surryadharma Ali Pada Surat Kabar Harian Sindo Edisi Mei 2014-April 2015.....	63
4.2.1. Frame Sindo, 27 Mei 2014 .....	63
4.2.2. Frame Sindo, 28 Mei 2014 .....	66
4.2.3. Frame Sindo, 29 Mei 2014 .....	67
4.2.4. Frame Sindo, Edisi 1 April 2015 .....	69

4.3. Pemberitaan Kompas dan Sindo tentang SDA Bila Ditinjau Dari Sudut Pandang Komunikasi dan Penyiaran Islam .....	72
<b>BAB V. KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan .....	74
5.2. Saran .....	75
5.3. Penutup .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan maraknya globalisasi yang tidak terbendung, masyarakat sebagai obyek dari media harus selektif dalam menggunakan media sebagai alat kemudahan informasi agar tidak terperangkap dalam kepentingan yang merugikan.

Di era reformasi, media di Indonesia seolah memiliki peran sebagai pengatur skenario dasar berjalannya proses demokrasi, oleh karena media berfungsi sebagai jalan penghubung antara rakyat dan pemerintahnya, dan juga media sebagai pemenuh kebutuhan masyarakat akan informasi yang selalu baru (*actual*) setiap waktunya. Seiring dengan kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat dengan tanpa ada tekanan (*intervensi*), termasuk pula hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia paling hakiki, dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Wibowo, 2009: 1).

Media sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 adalah sebagai media informasi (*information*), pendidikan (*education*), hiburan (*entertainment*) dan kontrol sosial (*social control*). Kondisi dimana media massa atau pers selain memberikan hiburan dan informasi kepada masyarakat, juga harus melakukan pengawasan oleh masyarakat (*social control*), untuk menjaga keselarasan masyarakat (Samantho, 2002: 64).

Media memiliki kuasa penuh dalam mengatur kerangka informasi berbentuk berita yang nantinya dikonsumsi masyarakat, berita yang disusun oleh

wartawan dan dikeluarkan oleh industri media mempunyai tujuan arah pemberitaan masing-masing dari satu media dengan media yang lain. Oleh karena, pemberitaan dari media dipengaruhi oleh beberapa unsur dalam pengemasannya, di antaranya adalah siapa pemilik medianya, kepentingan yang mendomplengi, serta ideologi dari wartawan yang menulisnya.

Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa media bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, dan cermin dari realitas. Media sebagaimana kita ketahui, justru mengkontruksi sedemikian rupa realitas. Tidak mengherankan jika setiap hari secara terus menerus masyarakat (komunikan) menyaksikan bagaimana peristiwa yang sama bisa diberitakan dalam sudut pandang yang berbeda oleh media.

Pemberitaan dalam satu hari yang sama, terkadang dengan peristiwa yang sama, media ada yang menganggap penting dengan meletakkan beritanya di halaman inti (*headline*) dan dijadikan topik utama sebagai bentuk penekanan, ada juga media yang hanya menaruhnya di halaman tengah, karena ada isu lain yang harus dimunculkan. ada peristiwa yang ditulis dengan *angle* (sudut pandang) berita yang berbeda dengan tujuan menghasilkan makna berita berbeda, dengan cara wawancara dan orang yang berbeda, dengan titik perhatian yang berbeda. Semua kenyataan ini menyadarkan kita betapa subyektifnya media. Mengetengahkan perbedaan semacam ini, tentu bukan menekankan bias atau distorsi dari pemberitaan media. Ini dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana berita yang kita baca tiap hari telah melalui proses konstruksi (Eriyanto, 2004: 2).

Media dalam keberlangsungannya mempunyai berbagai tujuan, salah satunya adalah tujuan politis dari pemiliknya, aktifitas media dalam melaporkan peristiwa-peristiwa bersifat politis memberi dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan politik. Media di samping sebagai sumber informasi politik, media juga kerap menjadi faktor pendorong perubahan politik. Media seolah memiliki fungsi tambahan selain sebagai pengontrol jalannya politik, saat ini media juga berfungsi sebagai mobilitas kampanye dari pemilik medianya. Keterlibatan pemilik media dalam partai politik serta juga ketika menjabat sebagai ketua, sangat berpengaruh sekali dengan sifat independensi dari wartawan (jurnalis) dan pemberitaannya.

Meskipun sikap independen dan objektif menjadi kiblat setiap jurnalis, pada kenyataannya kita seringkali mendapatkan suguhan berita yang beraneka warna dan ragam model yang berbeda dari sebuah peristiwa yang sama, media tertentu mewartakannya dengan cara menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedang media yang lainnya meminimalisir, memelintir, bahkan menutup sisi atau aspek tersebut. Ini semua menunjukkan bahwa dibalik jubah kebesaran independensi dan objektivitas, seorang jurnalis menyimpan kepentingan agar dapat memperoleh keuntungan.

Melihat kenyataan independensi media, seolah bisa dilihat bagaimana ideologi masing-masing media terbentuk, serta kearah mana media dalam memberitakan suatu peristiwa dipengaruhi penuh oleh siapa bos besar dibalik dari media, terutama yang berkaitan dengan isu-isu politik yang mana kerangka dari tujuan media dalam pemberitaannya benar-benar telah ditentukan kemana arahnya. Terkadang media dalam pemberitaannya bersifat kritis dan terkesan

menjatuhkan salah satu pihak tertentu, adakalanya juga dalam mengemas berita bertujuan untuk mencitrakan tokoh tertentu demi tujuan politis.

Tahun 2014, rakyat Indonesia tidak hanya diramaikan dengan adanya pemilu, pentas dan pesta politik yang dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pemilihan legislatif (Pileg) yang digelar pada bulan April dan pemilihan Presiden (Pilpres) pada bulan Juli. 22 Mei 2014 Suryadharma Ali (SDA) Menteri Agama periode 2009-2014 ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013.

Menteri yang bernama lengkap Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. (lahir di Jakarta, 19 September 1956; umur 58 tahun) adalah Menteri Agama Indonesia dari 22 Oktober 2009 hingga 28 Mei 2014. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu pertama.

Menghadapi proses hukum yang menunggunya, Suryadharma Ali menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin, 26 Mei 2014 dan resmi mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 28 Mei 2014 ([http://id.wikipedia.org/wiki/Suryadharma\\_Ali](http://id.wikipedia.org/wiki/Suryadharma_Ali), diakses 15 April 2014).

Suryadharma mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2010-2013. Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu juga menuntut ganti rugi Rp 1 triliun kepada KPK. Namun Hakim Tati Hadiati menolak semua gugatan praperadilan



yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu 8 April 2015.

Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka Suryadharma oleh KPK bukan merupakan upaya paksa seperti yang didalilkan pengacara pemohon. Menurut hakim, penetapan tersangka merupakan syarat untuk melakukan upaya paksa lain, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa lembaga praperadilan memiliki wewenang limitatif. Hal itu sebagaimana diatur Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Dani Prabowo, <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/11230341/Hakim.Tolak.Gugatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali>, diakses 15 april 2015).

Kasus yang di tahun 2015 masih berjalan telah menyita banyak perhatian media, diberitakan serentak semua media nasional dan juga media, tidak ketinggalan dua media besar Harian Kompas dan Sindo yang ikut serta memberitakan dengan kemasan dan kontruksi pemberitaan yang berbeda. Kedua media tersebut sama-sama memiliki ideologi yang berbeda dan sangat berpengaruh dalam dunia media di Indonesia.

Masyarakat sebagai objek dari media tidak bisa lepas dari pemberitaan oleh semua jenis media, diantaranya koran, televisi, radio, serta media online, yang pada kondisi saat itu pemberitaan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi. yang muncul di headline setiap harinya. Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk selektif dalam kaitannya menikmati sajian yang

dikeluarkan oleh media agar tidak terpengaruh kedalam alur tujuan pemberitaan dari media.

Dalam Islam, kaum muslimin diajarkan selektif dalam menyikapi ketika datang sebuah informasi dalam bentuk apapun. Hal tersebut tercermin dalam sebuah ayat yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al Hujurat ayat 6, yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ  
فَتُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (DEPAG RI, 1993 : 846).

Berangkat dari uraian di atas penulis sebagai masyarakat serta penikmat media mencoba untuk bisa selektif. Penulis juga tertarik ingin meneliti bagaimana cara pandang serta pembedaan dari kedua media besar di Indonesia yaitu Harian Kompas dan Harian Sindo tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. yang dilakukan Suryadharma Ali.

Penulis akan mencoba memposisikan diri sebagai analis media dengan menggunakan alat analisis yang bersifat kualitatif dan menggunakan analisis framing untuk bisa mengetahui bingkai pemberitaan yang dikeluarkan dari Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Sindo.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi berita kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi yang dilakukan oleh Suryadharma Ali dalam pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Sindo?

## **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi berita tentang Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi dari Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Sindo.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian tersebut diharapkan memperoleh manfaat, baik secara teoritik maupun praktik antara lain:

- a. Secara teoretik, penelitian ini agar berguna bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang media massa khususnya media cetak serta menambah khasanah keilmuaan bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- b. Secara praktis, diharapkan mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi mampu meningkatkan kekritisan serta lebih selektif terhadap segala pemberitaan yang dilakukan

berbagai media. Karena berita dalam proses produksinya sangat rentan akan pengaruh intern maupun ekstern dari produsen berita tersebut.

#### **1.4. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiarisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut;

*Pertama*, Skripsi berjudul *Konstruksi Pemberitaan Harian Kompas Tentang Kasus-Kasus Korupsi Edisi April 2008* oleh saudara Agung Deftiawan (2010), penelitian bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan tentang kasus korupsi yang telah diberitakan oleh Kompas edisi April 2008.

Penelitian tersebut merupakan pengkonstruksian dari lima berita yang diteliti dan di analisis. Ke lima berita tersebut dikupas secara mendalam untuk akhirnya diketahui makna, detil dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh Kompas. Kelima berita tersebut antara lain : (1) Amin Nasution Azirwan Tersangka Penyipuan, Sudah Diawasi Sejak November 2007, (2) Dugaan Suap, Di temukan 33.000 Dollar Singapura, (3) Dugaan Suap, Amin Masih Tetap Wakil Rakyat, (4) Aliran Dana BI, KPK Kembali Tahan Anggota DPR, (5) Ruang Ketua Komisi IV Di jebol, Tak Hanya Ruang Al Amin Yang Di geledah KPK. Hasil dari penelitian ini adalah KPK mendapatkan banyak dukungan dari berbagai macam elemen, Kompas terlihat sangat berhati-hati dalam menuliskan beritanya, meskipun Kompas tetap tegas dalam mengungkap fakta. Sisi religious tak terlalu di singgung dalam pemberitaan Kompas mengenai korupsi ini.

*Kedua*, Penelitian dari Marlina Ngatmin (2007) dengan judul *Analisis Framing Kasus Poligami KH. Abdullah Gymnastiar di Media Kompas dan*

*Sindo*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana media Kompas dan *Sindo* dalam membingkai berita kasus poligami Aa Gym berdasarkan konsep framing dari Robert M. Entman.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa surat kabar harian Kompas membingkai berita poligami Aa Gym sebagai masalah sosial Islam. Sebab aktor dari pelaku poligami ini adalah seorang publik figur yang begitu dikagumi oleh banyak jama'ahnya. Namun dengan adanya kasus poligami yang dilakukannya, banyak protes yang datang dari berbagai kalangan.

Mereka menganggap pernikahan kedua Aa Gym merupakan contoh yang tidak baik bagi jama'ahnya, terutama kaum lelaki. Akibat dari reaksi yang begitu banyak dari masyarakat, maka pemerintah pun ikut andil dalam masalah ini, yaitu dengan merevisi PP No. 10/1983.

Sedangkan surat kabar harian *Sindo* membingkai berita poligami yang dilakukan oleh Aa Gym sebagai masalah hukum Islam. Dalam kasus ini *Sindo* lebih memandang permasalahan poligami dari sisi hukum Islam. Dimana poligami dalam Islam tidak dilarang, bahkan Rasulullah juga mengijinkannya, asal saja melalui proses dan ketentuan ketat yang berlaku dalam hukum Islam. Tidak ada yang salah dengan poligami yang dilakukan oleh Aa Gym, sebab dia telah melalui ketentuan ketat yang berlaku dalam Islam.

*Ketiga*, skripsi dengan judul *Pemberitaan Tentang Dugaan dan bantahan Kasus Korupsi Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Di Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Harian Kompas Dan Republika* yang ditulis oleh Aziz Triana (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis wacana yang digunakan dalam surat kabar serta tujuan komunikasinya, agar kasus korupsi

pengadaan kitab suci AlQur'an di Kementerian Agama RI dapat dipahami oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan sumber datanya dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dan dengan metode pengumpulan data dokumentasi, guna memperoleh teks berita dengan tema seputar kasus korupsi pengadaan kitab suci Al-Qur'an di Kementerian Agama RI. Dalam teknik dokumentasi ini, satuan analisis yang digunakan adalah berita-berita yang terkait dengan tema di atas.

Berdasarkan hasil pengamatan dari penulis dari 18 wacana berita mengenai dugaan dan bantahan kasus korupsi pengadaan kitab suci Al-Qur'an di Kemenag yang terdapat dalam surat kabar Kompas dan Republika, membuktikan setiap wacana berita memiliki karakteristik jenis wacana yang digunakan, hal itu terkait dengan tujuan komunikasi yang di bangun, tentunya dari setiap wacana berita dapat dibedakan jenis wacana yang digunakan karena dalam tujuan komunikasi terdapat pula perbedaan penyampaiannya. Dari 18 wacana berita yang penulis teliti, surat kabar Republika paling produktif dalam memberitakan hal ini, dibuktikan dengan 12 wacana berita yang berhasil penulis dapatkan, sedangkan 6 wacana berita dimuat di surat kabar Kompas periode Juni hingga Agustus 2012.

*Keempat, Berita Pelanggaran Partai Politik dalam Pemilu 2004 Pada Media Lokal (Studi analisis Framing Terhadap Pelanggaran Partai Golkar, PDIP, dan PAN Dalam Pemilu 2004 Pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Periode Maret 2004) yang diteliti oleh Salam Abadi (2005).* Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan model analisis framing Gamson dan Modigliani, dan membahas tentang bagaimana berita yang

dikembangkan oleh KR adalah lebih menonjol untuk mengedepankan bahwa agenda pemilu ternyata belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Adanya pelanggaran yang terjadi justru semakin mengurangi nilai demokratisasi yang sedang dijalankan. Kesimpulan dari berita yang dibingkai oleh KR terhadap ketiga parpol, diantaranya:

- a. SKH KR membingkai pelanggaran yang dilakukan partai Golkar yang masih menggunakan praktek-praktek kampanye yang lama.
- b. PDIP dalam pemberitaannya dikemas sebagai partai yang paling sering melakukan pelanggaran, karena kampanye PDIP identik dengan kekerasan. PAN dikemas sebagai partai yang memanfaatkan kekuasaan dalam kampanye.

Dari beberapa penelitian di atas bisa dilihat perbedaan dari objek penelitian, Agung Deftiawan (2010), mengambil objek penelitian tentang Kasus-Kasus Korupsi Edisi April 2008 oleh saudara Saudari Marlina Ngatmin (2007) mengambil objek penelitian tentang pemberitaan Kasus Poligami KH. Abdullah Gymnastiar di Media Kompas dan Sindo, Aziz Triana (2014) mengambil objek penelitian tentang Tentang Dugaan dan bantahan Kasus Korupsi Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Di Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Harian Kompas Dan Republika, dan yang terakhir Berita Pelanggaran Partai Politik dalam Pemilu 2004 Pada Media Lokal (Studi analisis Framing Terhadap Pelanggaran Partai Golkar, PDIP, dan PAN Dalam Pemilu 2004 Pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Periode Maret 2004) yang diteliti oleh Salam Abadi (2005) dengan objek pemilu 2014.

Sedang objek penelitian yang penulis teliti merupakan objek penelitian yang belum diteliti dan berbeda dengan penelitian yang di atas, yaitu tentang pemberitaan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis teliti adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013: 6).

### **1.5.2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita di harian Kompas dan Sindo dimulai dari tanggal 23 Mei tahun 2014 sampai bulan April 2015. Alasannya, karena intensitas pemberitaan dengan tema yang penulis teliti dimulai dan ramai pada bulan Mei 2014 dan bulan April tahun 2015 pemberitaan kasus tersebut masih berlanjut.

Selain dari teks berita dalam penelitian tersebut, penulis juga menggunakan segala data tertulis yang berkaitan dengan tema yang bersangkutan baik itu dari buku, *company profile* dari Kompas dan Sindo, situs resmi kedua media (Kompas.com dan Koran-sindo.com,



Okezone.com) jurnal, skripsi, tesis, internet dan data-data lainnya yang menunjang data yang diperlukan.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, karena berhubungan dengan pengumpulan arsip serta data dari media yang akan penulis teliti.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998: 236).

Tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mempermudah dalam proses memperoleh data secara tertulis tentang berita-berita kasus korupsi Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013. Dalam hal ini penulis mengolah data dari berbagai literatur, buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian.

### **1.5.4. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data dari dokumen yang telah dikumpulkan agar dapat disusun dan dipaparkan dalam bentuk skripsi, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif dan alat analisis media framing. Menurut Eriyanto ada empat model framing yang dikembangkan oleh para ahli. Model-model tersebut dikembangkan oleh Edelman, Robert N. Entman, Gamson, serta Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Meskipun ada banyak istilah dan definisi, berbagai model tersebut mempunyai kesamaan.

Analisis framing secara umum membahas mengenai bagaimana media membentuk konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menampilkan kepada khalayak. Analisis framing adalah versi terbaru dari pendekatan wacana.

Di sini Penulis dalam mengkaji isi teks sebuah berita di surat kabar menggunakan analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Dalam pendekatan ini mereka membagi ke dalam empat struktur besar yaitu:

- a. Struktur sintaksis adalah cara wartawan menyusun berita. struktur ini dapat di amati melalui lead, latar, headline, informasi, kutipan, sumber pernyataan dan penutup.
- b. Struktur skrip, adalah cara wartawan mengisahkan fakta. Struktur ini memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita: 5W+1H.
- c. Struktur tematik, cara wartawan menulis fakta. Struktur ini dapat diamati melalui paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat.
- d. Struktur retorik, cara wartawan menekankan fakta. Struktur ini dapat diamati melalui kata, idiom, gambar, grafik.

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat menunjukkan framing dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat struktur tersebut (Nugroho, 1999: 31-32).

## 1.6. Sistematika Penulisan

Agar dalam penyusunan skripsi lebih sistematis dan terfokus pada pokok pemikiran, maka penulis sajikan sistematika pembahasan. Berikut adalah gambaran umum penyusunan skripsi yang terbagi dalam lima bab:

Bab pertama, Penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya bab kedua akan membahas tentang media yang meliputi (pengertian, jenis, dan sifat), berita (pengertian dan jenis), teori konstruksionis dan konstruksi sosial, kemudian membahas tentang realita korupsi di Indonesia serta temuan kasus korupsi selama tahun 2014.

Kemudian Bab ketiga akan dijabarkan gambaran tentang harian Kompas dan Sindo, obyek penelitian ini meliputi sejarah harian tersebut, visi dan misi dan pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, catering, dan transportasi di Surat Kabar Harian Kompas dan Sindo.

Bab keempat merupakan analisis tentang cara pandang pemberitaan kasus korupsi Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, catering, dan transportasi. Dalam bab ini Penulis akan menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis teks-teks berita tersebut.

Sedangkan dalam Bab terakhir adalah berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **MEDIA, TEORI KONSTRUKSI DAN FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA**

#### **2.1. Tinjauan Tentang Pemberitaan dan Media Massa**

##### **2.1.1. Pengertian dan Fungsi Media Massa**

Istilah media massa berasal dari Bahasa Inggris, yaitu singkatan dari *massa media of communication* atau *media of massa communication*, yang bahasa Indonesia yaitu komunikasi media massa atau komunikasi massa. Adapun komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan media elektronik) yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan arena seluas-luasnya. (Nurudin, 2004: 2)

Media merupakan saluran penyampaian pesan dalam komunikasi antar manusia. Menurut McLuhan, media massa adalah perpanjangan alat indera kita. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak kita alami secara langsung. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi. Untuk khalayak informasi dapat membentuk, mempertahankan dan mendefinisikan citra. (Nova, 2009: 2004-2005)

Media massa merupakan suatu institusi yang melembaga yang bertujuan untuk menyampaikan informasi peristiwa atau kejadian kepada khalayak agar *well informed* (tahu informasi) (Kuswandi, 1996:98).

Fungsi media secara umum adalah sebagai berikut.

1. Media massa memiliki fungsi pengantar (pembawa) bagi segenap pengetahuan. Jadi, media massa memainkan peran institusi lainnya.

2. Media massa menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik. Pada dasarnya media massa dapat dijangkau oleh segenap anggota masyarakat secara sukarela, umum, dan murah.
3. Pada dasarnya hubungan antara pengirim pesan dengan penerima pesan seiring dan sama.
4. Media massa menjangkau lebih banyak orang dari institusi lainnya dan sejak dahulu “mengambil alih” peranan sekolah, orang tua, agama dan lain.

Aktifitas media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Disebabkan oleh sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah mengemas peristiwa semenarik mungkin untuk disajikan kepada khalayak umum, maka seluruh isi media merupakan realitas yang dikonstruksikan. Pembuatan media di media massa sebenarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita.

Isi media salah satunya adalah pemberitaan, hasil para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya. Pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap ataupun interpretatif (telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh redaksi pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan (*investigative reporting*) yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, trend/ kecenderungan, yang mungkin terjadi pada masa mendatang.

Pemberitaan pada hakekatnya merupakan hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan, bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa

menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya (Alex Sobur, 2002: 88).

### **2.1.2. Teori Konstruksi Media Massa**

Teori konstruksi pertama diperkenalkan oleh Peter L. Berger Thomas Luckman, ia berpendapat bahwa, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh tuhan. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman tersebut memungkinkan setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Seseorang yang mempunyai pengalaman, referensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing (Eriyanto, 2005: 15).

Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi sebagaimana yang dikutip Donie Kadewandana berpendapat bahwa pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan melalui tiga proses sosial, yaitu *eksternalisasi*, *objektivasi*, dan *internalisasi*. Proses ini terjadi antara individu satu dengan lainnya di dalam masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut adalah objektif, subjektif, dan simbolis atau intersubjektif.

Realitas *objektif* adalah realitas yang terbentuk dari pengalaman di dunia objektif yang berada di luar diri individu, dan realitas ini dianggap sebagai kenyataan. Realitas simbolis merupakan ekspresi

simbolis dari realitas objektif dalam berbagai bentuk. Sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang terbentuk sebagai proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolis ke dalam individu melalui proses internalisasi.

*Eksternalisasi* (penyesuaian diri), sebagaimana yang dikatakan Berger dan Luckmann merupakan produk-produk sosial dari eksternalisasi manusia yang mempunyai suatu sifat yang *sui generis* dibandingkan dengan konteks organismus dan konteks lingkungannya, maka penting ditekankan bahwa eksternalisasi itu sebuah keharusan antropologis yang berakar dalam perlengkapan biologis manusia. Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan interioritas yang tertutup dan tanpa gerak. Manusia harus terus-menerus mengeksternalisasikan dirinya dalam aktivitas. Objektivasi, tahap obyektivasi produk sosial, terjadi dalam dunia intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Pada tahap ini sebuah produk sosial berada pada proses institusionalisasi, sedangkan individu oleh Berger dan Luckman, dikatakan memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia, baik bagi produsen-produsennya, maupun bagi orang lain sebagai unsur dari dunia bersama. Objektivasi ini bertahan lama sampai melampaui batas tatap muka di mana mereka dapat dipahami secara langsung.

*Internalisasi*, dalam arti umum internalisasi merupakan dasar bagi pemahaman mengenai “sesama saya”, yaitu pemahaman individu dan orang lain serta pemahaman mengenai dunia sebagai sesuatu yang



makna dari kenyataan sosial. Individu oleh Berger dan Luckman dikatakan, mengalami dua proses sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dialami individu dalam masa kanak-kanak, yang dengan itu, ia menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses lanjutan dari sosialisasi primer yang mengimbas ke individu, yang sudah disosialisasikan ke dalam sektor-sektor baru di dalam dunia objektif masyarakatnya (Kadewandana, 2008).

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. Penilaian tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu.

Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. Dalam konsepsi positivis diandaikan ada realitas yang bersifat “eksternal” yang ada dan hadir sebelum wartawan meliputnya. Jadi, ada realitas yang bersifat objektif, yang harus diambil dan diliput oleh wartawan. Pandangan semacam ini sangat bertolak belakang dengan pandangan konstruksionis. Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang

tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari berita. Fakta/realitas pada dasarnya dikonstruksi.

Manusia membentuk dunia mereka sendiri. Dalam kata-kata yang terkenal dari Carey, realitas bukanlah sesuatu yang terberi, seakan-akan ada, realitas sebaliknya diproduksi. Pertanyaan utama dalam pandangan konstruksionis adalah fakta berupa kenyataan itu sendiri bukan sesuatu yang terberi, melainkan ada dalam benak kita, yang melihat fakta tersebut. Kitalah yang memberi definisi dan menentukan fakta tersebut sebagai kenyataan. Karena fakta itu diproduksi dan ditampilkan secara simbolik, maka realitas tergantung pada bagaimana ia dilihat dan bagaimana fakta tersebut dikonstruksi. Dalam kata-kata yang ekstrim, realitas atau fakta itu tergantung pada bagaimana ia dilihat. Pikiran dan konsepsi kitalah yang membentuk dan mengkreasikan fakta.

Media adalah agen konstruksi. Pandangan konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan positivis, media dilihat sebagai saluran. Media adalah sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator ke penerima (khalayak). Media dilihat murni sebagai saluran, tempat bagaimana transaksi pesan dari semua pihak yang terlibat dalam berita. Pandangan semacam ini, tentu saja melihat media bukan sebagai agen melainkan hanya saluran. Media dilihat sebagai sarana yang netral. Kalau ada berita yang menyebutkan kelompok tertentu atau menggambarkan realitas dengan citra tertentu, gambaran semacam itu merupakan hasil dari sumber berita (komunikator) yang menggunakan media untuk

mengemukakan pendapatnya. Pendeknya, media disini tidak berperan dalam membentuk realitas. Apa yang tampil dalam pemberitaan itulah yang sebenarnya terjadi. Ia hanya saluran untuk menggambarkan realitas, menggambarkan peristiwa. Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat sebaliknya.

Media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat saluran bebas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya menunjukkan pendapat sumber berita, tetapi juga konstruksi dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.

Media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa, bisa jadi (hanya) peristiwa bentrokan itu saja yang diberitakan, sementara peristiwa demonstrasi yang berlangsung damai, luput atau tidak mendapat tempat dalam pemberitaan. Media juga memilih (secara sadar atau tidak) aktor demonstrasi yang dijadikan sumber berita sehingga hanya sebagian saja dari sumber berita yang tampil dalam pemberitaan.

Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa. Lewat bahasa yang dipakai, media dapat menyebut mahasiswa

sebagai pahlawan, dapat juga menyebutnya sebagai perusuh. Lewat pemberitaan pula, media dapat membingkai peristiwa demonstrasi dengan bingkai tertentu yang pada akhirnya menentukan bagaimana khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dalam kacamata tertentu.

Menurut kaum positivis, berita adalah refleksi dan pencerminan dari realitas, Berita adalah *mirror of reality*, karena ia harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Pandangan ini ditolak oleh kaum konstruksionis, menurut kaum konstruksionis berita adalah hasil dari konstruksi sosial di mana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai.

Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. Perbedaan antara realitas yang sesungguhnya dengan berita tidak dianggap salah, tetapi sebagai suatu kewajaran. Perbedaan antara pendekatan positivis dan konstruksionis dalam memahami berita, mengakibatkan perbedaan pula dalam hal bagaimana hasil kerja seorang wartawan seharusnya dinilai. Berita pada dasarnya adalah hasil kerja konstruksi jurnalistik, bukan kaidah buku jurnalistik (Eriyanto, 2004: 19-26).

Media dalam kelangsungan kerjanya tersusun oleh beberapa unsur, diantaranya adalah: pemilik media, pemimpin redaksi, wartawan

atau reporter, serta produk yang dikeluarkan. Salah satu produk dari media adalah informasi, informasi yang disusun oleh wartawan dalam bentuk berita dan kemudian dikeluarkan sesuai jenis medianya (televisi, radio, koran, majalah, dan tabloid).

### 2.1.3. Pengertian dan Jenis Berita

Berita berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *Vrit* yang dalam bahasa Inggris disebut *Write*, arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Sebagian ada yang menyebut dengan *Vritta*, artinya kejadian atau yang telah terjadi. *Vritta* dalam bahasa Indonesia kemudian menjadi berita atau warta (Djuroto, 2000: 4).

Berita juga bisa diartikan sebagai laporan tentang peristiwa/*event* dan atau pendapat yang memiliki hal penting, menarik bagi sebagian besar khalayak, masih baru/ aktual dan dipublikasikan secara luas melalui media massa periodik (surat kabar, radio, majalah, tabloid, bulletin, televisi, film). Berita berasal dari sumber berita, sumber berita adalah asal mula terjadinya berita itu, dan yang dimaksud dengan sumber berita adalah peristiwa (*event*) dan manusia. Syarat sebuah berita adalah bila ada peristiwa atau pendapat, maka peristiwa atau pendapat itu harus dinilai apakah menarik, penting, dan masih baru (Wahyudi, 1991: 115).

Menurut Romli (2005:3) berita (*news*) merupakan sajian utama sebuah media massa di samping views (opini). Mencari bahan berita lalu menyusunnya merupakan tugas pokok wartawan dan bagian redaksi sebuah penerbitan pers (media massa).

Menurut Ana Nadya Abrar dalam Panduan Buat Pers Indonesia sebagaimana yang dikutip Darmanto, berita pada hakikatnya tertulis atas suatu realitas yang ada dalam masyarakat. Namun realitas objektif yang ada baik berupa peristiwa atau ide tidaklah sama dengan realitas berita di media massa. Hal ini dimungkinkan karena proses pembuatan sebuah berita pada dasarnya melalui tahap-tahap tertentu yang dikerjakan wartawan seperti menyorik fakta, mencari hubungan antar fakta, merekonstruksi kejadian dan menjadikan informasinya berbeda dengan pers lain. Tujuannya satu, yaitu untuk menyajikan informasi yang cocok untuk pembaca (Darmanto, 2006, 3).

Menurut As Haris Sumandiria, ada beberapa jenis berita yang sering digunakan oleh seorang wartawan dalam menulis sebuah berita yang ada di dalam media cetak sebagai berikut:

1. *Straight news* adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Berita ini biasanya ditulis dengan unsur 5W 1H (*what, who, when, where, why dan how*).
2. *Indepth news* adalah berita mendalam, dikembangkan berdasarkan penelitian dan penyelidikan dari berbagai sumber.
3. *Comprehensive news* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari beberapa aspek, maksudnya mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benar merahnya terlihat jelas.

4. *Interpretative news* berita ini memfokuskan sebuah isu, masalah atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini.
5. *Feature story* adalah berita yang menyajikan suatu pengalaman. Berita yang berisi cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik.
6. *Investigative reporting* adalah berita yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan (Sumandiria, 2005 : 69-71).

## **2.2. Tinjauan Tentang Korupsi Di Indonesia**

### **2.2.1. Pengertian Korupsi**

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai soal yang amat besar.

Istilah “Korupsi” saat ini dikenakan terhadap semua bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah dan dari semua jenjang dari yang paling atas hingga yang paling bawah. Karena itu, korupsi tidak hanya dimaknai sebagai mengambil secara tidak sah uang negara tetapi juga meliputi pengambilan barang-barang investasi kantor (kertas dan lain-lain) termasuk mengerjakan pekerjaan non kantor pada jam kantor tanpa izin dengan tujuan untuk menambah penghasilan (disebut korupsi waktu),

juga merubah harga barang yang akan dibeli atau dijual untuk negara (Musni Umar, 2004: 77).

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang berarti menyuap dan *corrumpere* atau merusak. Secara umum, istilah korupsi selama ini mengacu kepada berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Tetapi dalam perkembangan lebih akhir, dari beragam pengertian korupsi terdapat penekanan, bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selain pengertian tersebut, korupsi juga dapat diartikan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa.

Korupsi dalam praktiknya, memiliki beragam makna. Sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu bersilang pendapat untuk merumuskan pengertian yang paling memadai. Seorang pejabat dikatakan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang sebenarnya adalah kewajiban, istilah korupsi kadang juga dikenakan pada pejabat yang



menggunakan uang negara yang berapa di bawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi.

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu: *pertama*, seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut. *Kedua*, adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan tersebut. *Ketiga*, sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. (Zachrie, 2009: 6)

Korupsi sebagai tingkah laku pejabat yang menyimpang dari norma yang telah diterima masyarakat. Bentuk lainnya adalah balas jasa dari pihak ketiga yang diterima oleh masyarakat, dengan maksud mencapai tujuan pribadi. Dari ilustrasi diatas adalah tingkah laku pejabat yang melanggar keuangan milik masyarakat. Korupsi juga terjadi pada tindakan di luar hukum untuk mempengaruhi tindakan dan kebijakan birokrasi. Di sini, korupsi ditujukan untuk ‘membeli ‘ persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan tertentu. Misalnya, menyogok pejabat untuk memperoleh valuta asing, surat izin menanam modal, izin produksi, atau untuk menghindari pajak. Di dalamnya, terjadi praktik suap yang memasukkan uang ke kantong pribadi milik pejabat dan bukan ke kas negara. Karena itulah, korupsi dipandang sebagai subversi atas kebijakan pemerintah serta sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan.

### **2.2.2. Fenomena Korupsi Di Indonesia**

Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi.

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung.

Korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa Negara ke jurang kehancuran. Di Indonesia, istilah korupsi awalnya bersifat umum, kemudian menjadi istilah hukum sejak dirumuskannya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/1957 tentang korupsi. Berdasar konsideran peraturan tersebut, korupsi memiliki dua unsur: pertama, perbuatan yang berakibat pada perekonomian negara. Kedua, perbuatan yang berbentuk pada penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sebagaimana penampilan kekuasaan, bentuk korupsi bermacam-macam. Mulai dari intimidasi dan pemaksaan kekuasaan yang berakar pada arogansi kekuasaan sampai penggelapan harta negara ataupun masyarakat serta pemberian kesempatan (keleluasaan) bisnis dan posisi untuk keuntungan pribadi atau golongan (Munawar Fuad Noeh, 2005: 1-7).

Mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasinya sejak tahun 1971, melalui UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tahun 1999, terbitlah UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi aturan utama tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Siapakah orang yang melakukan korupsi, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini merupakan delik pidana korupsi yang dijelaskan UU.

Selanjutnya pada Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang. Dalam mempermudah penindakan terhadap pelaku korupsi, Pemerintah RI berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 telah dibentuk komisi khusus menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat KPK. Komisi tersebut menurut Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (<http://gresnews.com/berita/tips/337158-landasan-hukum-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2014 telah menangani kasus korupsi di Indonesia, sebagaimana yang dikutip dari situs Okezone.com:

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim berhasil menggarap 38 kasus korupsi sepanjang 2014. Hal ini diungkap KPK dalam laporan akhir tahun yang bertepatan dengan hari jadinya yang ke-11.

"Sebanyak 38 kasus sudah dieksekusi di 2014 dalam 44 perkara, ada juga perkara tahun lalu. Jumlah penyelidikan yang dilakukan KPK ada 75 kasus," ungkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, saat jumpa media di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014).

Dari hasil pencapaian perkara KPK, diketahui terdapat 78 kegiatan penyelidikan, 93 penyidikan, 77 kegiatan penuntutan, dan eksekusi terhadap 44 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari Rp110 miliar telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBPN dari penanganan perkara.

Selain itu, KPK juga mengungkapkan prestasinya di bidang penegakan hukum yang telah bekerja optimal dan mendapatkan apresiasi serta penghargaan dari berbagai lembaga dan instansi penegakan hukum di Indonesia.

"Kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. KPK juga mendapatkan nilai A pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan mendapatkan prestasi sebagai lembaga terbaik 2014 dari Soegeng Sarjadi School of Government," tambah Ketua KPK, Abraham Samad (Andini, KPK eksekusi 38 kasus-korupsi sepanjang 2014, <http://news.okezone.com/read/2014/12/29/337/1085402/kpk-eksekusi-38-kasus-korupsi-sepanjang-2014>, diakses 15 April 2015).

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data tentang kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi selama semester I tahun 2014. Ditemukan sebanyak Rp 3,7 triliun uang negara 'hilang' karena dikorupsi oleh pejabat mulai dari pusat hingga daerah.

Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW Tama S Langkun mengatakan, jumlah kerugian tersebut berasal dari 308 kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan jumlah tersangka sebanyak 659 orang.

(Huda, kerugian Negara akibat korupsi capai 37 triliun. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/17/nafz0b-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-37-triliun>, diakses 15 April 2015).

**BAB III**

**DESKRIPSI TENTANG SURAT KABAR HARIAN KOMPAS DAN SINDO**

**SERTA PEMBERITAAN DUGAAN KASUS KORUPSI**

**SURYADHARMA ALI**

Dalam bab ini, penulis menyajikan tentang deskripsi atau gambaran umum dari kedua media yang menjadi objek penelitian penulis, yaitu surat kabar harian Kompas dan surat kabar harian Sindo, serta data pemberitaan tentang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.

**3.1. Gambaran Umum Harian Kompas**

**3.1.1. Sejarah dan Ideologi Harian Kompas**

Harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia (KG), yang didirikan oleh PK. Ojong (almarhum) dan Jakob Oetama sejak 28 Juni 1965.

Mengusung semboyan "Amanat Hati Nurani Rakyat", Kompas dikenal sebagai sumber informasi tepercaya, akurat, dan mendalam. Lebih dari 2 juta pembaca dan pencapaian oplah terbesar mencapai 530.000 eksemplar setiap hari di semua provinsi di Indonesia. Kini Kompas terus tumbuh melihat jauh ke depan untuk menghadirkan informasi terpilih, terverifikasi, dan berkualitas untuk Anda. (<http://profile.print.kompas.com/profil/>, diakses, 16 Juni 2015)

Merujuk kepada dokumen resmi Kompas, bervisi menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman, dan sejahtera dengan mempertahankan Kompas sebagai *market leader* secara nasional melalui optimalisasi sumber daya dan sinergi bersama mitra strategis. Secara umum, Kompas menyatakan diri sebagai media yang independen dan mencoba lebih “*objektif*” dalam setiap pemberitaannya.

Selain itu, Kompas menempatkan kemanusiaan sebagai suatu ideologi yang ditanamkan oleh para pendirinya, Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama: amanat hati nurani rakyat. Kalimat itu bermakna kehendak memanusiakan manusia dengan basis Ilahi (*humanisme transedental*). Artinya, Kompas ingin dalam setiap pemberitaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Cara Kompas memandang sesuatu peristiwa memanglah tidak sangat kritikal, seperti selalu mencari-cari kekurangan orang lain dalam pemberitaan. Seperti yang didedahkan oleh Jakob Oetama dalam buletin internal Kompas-Gramedia, Info Kita edisi No. 1/Januari 2011: Intisari diterbitkan, selanjutnya percetakan, toko buku, Kompas berikut segala unit kerja yang tumbuh kemudian, berkembang karena bekerja bersama.

Jatidiri keberhasilan adalah kerja sama. Saling mendukung. Yang lemah dikuatkan, yang kuat memberikan dukungan. Kebiasaan membesar-besarkan kekurangan orang lain, kita balik dengan membesar-besarkan kelebihan orang lain. Untuk apa? Untuk menciptakan kebersamaan. Apalagi ternyata jati diri pekerjaan kita adalah kerja sama, saling memberi

kontribusi, yang dipresentasikan dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Koran digarap bagus, dicetak bagus, diedarkan luas, memperoleh kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak pada cita-cita mencerahkan dan memperoleh iklan, terjadi karena kontribusi semua pihak. Mengambil contoh, kerja bersama unit usaha media tidak berarti memperkecil makna dan keharusan kerja bersama di unit-unit usaha lain. Kerja bersama menjadi jati diri dan keharusan dihasilkannya keberhasilan.

Sikap yang penuh toleransi kepada pelbagai pihak yang tampak pada Kompas, sikap yang positif di segala bentuk kebaikan dan kebajikan, baik kumpulan ataupun individu. Maka kalau ditafsirkan, dalam konteks politik seorang pemimpin yang memiliki kerja-kerja yang buruk tidak sentiasa ditampakkan buruk semuanya, tetapi pula dipaparkan secara seimbang apa saja kelebihanannya. Tujuannya adalah kepada Kompas sendiri agar tidak berdampak negatif.

Sebagai media yang mengidentifikasikan pembawa kepentingan dan suara hati rakyat, Kompas merasa mampu menyampaikan berita yang *actual* dan kontroversi melalui kolom karikturnya. Ideologi Kompas selalu digunakan dalam produk kewartawanan Kompas. Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama selalu mengajarkan kewartawanan yang santun kepada para pekerja Kompas dengan jalan mengedepankan cara yang santun dan elegan dalam memberikan kritik terhadap suatu keadaan. Pemilihan bahasa yang digunakan dipilih bahasa yang sopan dan santun, tetapi orang yang diberikan kritik menyadari bahwa ada perbuatannya yang tidak benar.



Kompas disebutkan menyajikan berita cenderung sesuai dengan fakta realiti yang ada, lebih kritikal, dan tidak berpihak terhadap kelompok atau partai apapun untuk menghindari berita-berita yang membuat Kompas pernah dilarang cetak oleh pemerintah. Hal tersebut mengindikasikan editorial Kompas menjadi alat berlandung dari kekuatannya, salah satunya dalam bentuk karikatur. Kompas menjadi satu media yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan besar untuk membantu meningkatkan dukungan dan mengajak khalayak untuk selalu berpihak pada setiap langkah kebijakan pemerintah.

### **3.1.2. Visi dan Misi**

Visi dan misi dari Kompas Gramedia adalah Menjadi Perusahaan yang terbesar, terbaik, terpadu dan tersebar di Asia Tenggara melalui usaha berbasis pengetahuan yang menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan dan adil sejahtera. (<http://kompasgramedia.com/about-kg/vision-mission-values>, Diakses 16 Juni 2015)

Motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” di bawah logo Kompas, menggambarkan visi dan misi bagi disuarakannya hati nurani rakyat. Berangkat dari visi dan misi ini Oetama yang dikutip Dewabrata mengatakan bahwa “Berita harus bermutu, harus mengangkat persoalan yang ada dalam masyarakat, harus memanusiaikan manusia, membela hak asasi manusia.” Sedangkan Swantoro selaku Wakil Pimred Kompas menafsirkan pesan Oetama bahwa, “Mutu di sini bukan hanya isinya, tetapi juga cara menyajikannya.”

Menurut Santoso, Kompas ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotakan latar belakang suku, ras, agama dan golongan. Karena Kompas merupakan lembaga yang terbuka, Kompas ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan focus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transenden atau mengatasi kepentingan kelompok.

Visi Kompas adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan.

Dalam kiprahnya di industri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Panca Sila melalui prinsip humanism transcendental (persatuan dan perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur, seperti uraian sebagai berikut:

*Pertama*, Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka. *Kedua*, Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi. *Ketiga*, Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok. *Keempat*, Kompas adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa. *Kelima*, Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan (Kasman, 2010: 160).

Misi Kompas adalah mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara professional, sekaligus memberi arah perubahan (*Trend Setter*) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya.

Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha diantara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. *Pertama*, Kompas memnerikan informasi yang berkualitas dengan ciri: cepat, cermat, utuh, dan selalu mengandung makna. *Kedua*, Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan.

*Ketiga*, kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi kritis dan teguh pada prinsip. *Keempat*, berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan tiras. Untuk dapat perealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dan usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menunjang kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan (Kasman, 2010: 161).

## 3.2. Gambaran Umum Harian Sindo

### 3.2.1 Sejarah Harian Sindo

Harian "Seputar Indonesia" adalah surat kabar Nasional yang terbit setiap hari di seluruh daerah dan pelosok Indonesia, terdiri dari tiga *section*: yakni *News*, *Sports*, dan *Lifestyle*. Harian Seputar Indonesia terbit selama 7 hari selama 1 minggu, dengan format ukuran panjang 7 kolom dan tinggi 54 cm. Edisi Reguler terbit 40 halaman dengan 3 bagian sedangkan Minggu terbit 40 halaman edisi akhir minggu. Target pembacanya adalah masyarakat kelas menengah ke atas, pendidikan Sarjana, segmentasi usia dari 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Dengan diferensiasi pembaca laki-laki sebanyak 60% dan pembaca wanita sebanyak 40%. Target distribusi Harian Seputar Indonesia adalah kota-kota besar di seluruh Indonesia dengan jumlah oplah sebesar 336.000 pembaca. Slogannya adalah "Sumber Referensi Terpercaya" (<http://id.wikipedia.org/>, akses 26/05/2015).

Sajian berita yang bersahabat, karena pemanfaatan bahasa dan image yang ramah aktual dan informatif, karena berita terkini disajikan dengan ringkas dan jelas dengan topik-topik yang hangat. Koran yang menghibur karena didukung oleh desain yang menarik dan tidak membuat kening berkerut. Mampu mengakomodasi *Feature Lifestyle* dan *Infotainment* sekuat berita. Sajian berita yang bersifat Non Partisan atau tidak memihak dan dapat dipercaya. Koran Seputar Indonesia "Satu Koran semua berita". Demikianlah jargon yang dipakai. (<http://www.seputar-indonesia.com>, akses, 24/06/2015).

### **3.2.2 Visi dan misi**

Visi Koran Seputar Indonesia adalah menjadi Koran keluarga yang ideal di wilayah Indonesia. Koran keluarga di sini meliputi informasi berita keluarga, olahraga, hiburan, edukatif, dan bisnis.

Sedangkan misinya adalah menjadi koran keluarga nomor satu yang harganya terjangkau dan dekat dengan pembacanya. Dengan harga yang terjangkau, berita yang disajikan lebih komplit atau lengkap sehingga setelah membaca koran Sindo tidak perlu lagi membeli majalah, tabloid atau yang lainnya.

### **3.3. Pemberitaan Kasus Korupsi Suryadharma Ali di SKH Kompas dan Sindo**

Dimulai dengan kronologi pengusutan kasus penyelenggaraan haji hingga penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dan dicegah bepergian ke luar negeri: Tahun 2013 KPK mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama.

Awalnya PPATK mencium adanya penyimpangan dalam perjalanan haji. Ketua PPATK Muhammad Yusuf menyebut, sepanjang 2004-2012, ada dana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 80 triliun dengan bunga sekitar Rp 2,3 triliun.

Hasil audit PPATK, ada transaksi mencurigakan sebesar Rp 230 miliar yang tidak jelas penggunaannya. Ada indikasi dana haji ditempatkan di suatu bank tanpa ada standarisasi penempatan yang jelas.

KPK menyambut temuan tersebut dan melakukan penyelidikan selama hampir setahun. Namun, belum ada pihak-pihak yang diperiksa. Januari 2014, KPK mulai melakukan penyelidikan atas dugaan penyimpangan dana haji tahun

anggaran 2012-2013 khususnya pengadaan barang dan jasa. KPK juga menyelidiki biaya BPIH.

3 Februari 2014, KPK memeriksa anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar 6 Februari 2014 KPK juga meminta keterangan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat asal fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini.

19 Maret 2014 KPK meminta keterangan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Anggito Abimanyu. 6 Mei 2014: KPK meminta keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait penyelidikan proyek pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji. Selama sepuluh jam, Suryadharma, di antaranya, dicecar soal pemondokan haji yang tak layak. 15 Mei 2014: Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa dalam satu atau dua pekan ke depan KPK akan menetapkan tersangka. 16 Mei 2014, Capres Prabowo Subianto sempat memuji Suryadharma Ali dengan menyebut penyelenggaraan ibadah haji sangat baik. 22 Mei 2014, KPK menggeledah ruang kerja Suryadharma di lantai II Gedung Pusat Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, selama sembilan jam.

22 Mei 2014, KPK menetapkan Suryadharma sebagai tersangka 22 Mei 2014, Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah Suryadharma Ali bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

22 Mei 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012/2013. Suryadharma diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji dengan berbagai modus. Salah satu yang diduga dikorupsi adalah dana setoran awal yang

dibayarkan masyarakat dan disalahgunakan untuk keberangkatan haji kementerian agama dan keluarganya. (Kompas, 2014: 1, Mei).

Menteri Agama Suryadharma Ali, meski ditetapkan sebagai tersangka belum berfikir untuk melepaskan jabatannya sebagai menteri agama, hingga akhirnya ia mengirimkan surat pengunduran diri sebagai menteri pada hari rabu tanggal 28 Mei 2014 dan digantikan wakil ketua MPR Lukman Hakim pada 9 Juni 2014, Lukman yang pada saat itu juga menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Status Suryadharma Ali sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan pun masih terus berlanjut sesuai ketentuan sampai akhir masa jabatan pada muktamar PPP tahun 2015. (Kompas, 2014: 2, Juni)

Suryadharma kemudian mengajukan permohonan praperadilan terhadap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada senin 23 Februari 2015, Suryadharma menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013. Surya mengajukan permohonan praperadilan atas KPK karena ingin mencari keadilan akibat tindakan penyidik dan pimpinan KPK, yang dianggap semena-mena menetapkan Suryadharma sebagai tersangka, penyidik belum memiliki bukti yang cukup kuat soal status tersangka Suryadharma. SDA juga menuntut KPK satu triliun rupiah sebagai ganti rugi atas penetapan dirinya sebagai tersangka. (Koran Sindo, 2015: 3, Maret)

Dalam persidangan yang dipimpin hakim Tati Hadiyati, anggota tim kuasa hukum Suryadharma, Humphrey R Gani menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Kliennya patut diduga mengandung unsur politis, karena suryadharma mendukung calon presiden Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden 2014.

Suryadharma ditetapkan sebagai tersangka dua hari setelah dia menghantar Prabowo dan calon wapres Hatta Rajasa untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum.

KPK patahkan dalil SDA, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, penetapan tersangka Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didasarkan pada sejumlah bukti permulaan yang cukup serta berdasarkan dari 34 saksi dan 408 dokumen. Ditemukan pula indikasi kerugian negara 3,07 miliar rupiah dari proses penyelenggaraan ibadah haji 2012 dan 2013 dan juga kerugian negara 1,83 triliun rupiah dari pengadaan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi. KPK juga berpendapat, ganti rugi satu triliun rupiah yang dituntutkan Suryadharma tidak memiliki dasar hukum. (Kompas, 2015: 4, April)

KPK menahan mantan Menteri Agama 11 April 2015, setelah diperiksa sebagai tersangka. Penahanan Suryadharma Ali menunjukkan berkas penyidikan terhadap dia hampir selesai. KPK memiliki waktu maksimal tiga bulan untuk segera melimpahkan perkara SDA ke pengadilan tindak pidana korupsi. KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) *juncto* Pasal 55 Ayat 1 Kesatu *juncto* Pasal 65 KUHP. (Kompas, 2015: 11, April)



Tabel. 1

## Pemberitaan Kasus Korupsi Suryadharma Ali di Surat Kabar Harian Kompas

No	Surat Kabar	Edisi	Judul Berita	Letak Berita	Luas Space
1.	Kompas	23 Mei 2014	Suryadharma Ali Terkejut	Halaman Pertama	2 Halaman
2.		24 Mei 2014	SDA Belum Mau Lepas Jabatan	Halaman Pertama	2 Halaman
3.		28 Mei 2014	Suryadharma Kirim Surat Mundur	Halaman Pertama	2 Halaman
4.		12 Juni 2014	Suryadharma Ali Tetap Ketua Umum PPP	Halaman Kedua	1 Halaman
5.		1 April 2015	KPK Patahkan Dalil SDA	Halaman Keempat	1 Halaman
6.		11 April 2015	Suryadharma Ali Ditahan	Halaman Pertama	2 Halaman
<b>Jumlah Berita</b>			<b>6 Berita</b>		

Tabel. 1

## Pemberitaan Kasus Korupsi Suryadharma Ali di Surat Kabar Harian Sindo

No	Surat Kabar	Edisi	Judul Berita	Letak Berita	Luas Space
1.	Koran Sindo	27 Mei 2014	Suryadharma Ali Mundur	Halaman Pertama	2 Halaman
2.		28 Mei 2014	KPK Bertekad Bongkar Kasus Haji	Halaman Pertama	2 Halaman

<b>3.</b>		29 Mei 2014	<b>KPK Pastikan Kasus Haji Akan Ada Tersangka Lain</b>	Halaman Pertama	2 Halaman
<b>4.</b>		1 April 2015	<b>Suryadharma Ali Tuntut Kpk Rp 1 Triliun</b>	Halaman Ketiga	1 Halaman
<b>Jumlah Berita</b>			<b>4 Berita</b>		

**BAB IV**

**ANALISIS PEMBERITAAN KASUS KORUPSI SURYADHARMA ALI**

**DALAM SURAT KABAR HARIAN KOMPAS DAN SURAT KABAR**

**HARIAN SINDO**

**4.1 Analisi Framing Berita Surryadharma Ali Pada Surat Kabar Harian Kompas Edisi Mei 2014-April 2015**

Analisis Framing merupakan salah satu model analisis alternatif yang bisa mengungkapkan rahasia di balik perbedaan, bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis Framing membongkar bagaimana realitas dibingkai oleh media. Melalui Analisis Framing dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, mana lawan mana kawan, mana patron mana klien, siapa diuntungkan siapa dirugikan, siapa membentuk dan siapa dibentuk, dan seterusnya. (Syamsul Komunikasi, *Framing* <http://komunikasi-samsulhuda.blogspot.com/2009/04/framing.html>, diakses 1 Juli 2015)

Dalam mengolah dan menganalisis data, untuk dapat mengetahui bagaimana konstruksi dari berita yang diterbitkan oleh Surat Kabar Harian Kompas dan Koran Sindo, penulis menggunakan analisis framing dengan model dari Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan empat struktur pendekatan yaitu: Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris.

#### 4.1.1 Frame Kompas, 23 Mei 2014

**“Suryadharma Ali Terkejut”** Aburizal Bakrie Tetap Yakin Prabowo Hatta.

##### a. Struktur Sintaksis

Berita dalam edisi tersebut, judul “Suryadharma Ali Terkejut” menjelaskan ketidaktahuan Suryadharma tentang penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika dikonfirmasi Kompas dan diperdalam di isi berita. Kemudian Kompas mengarahkan pembaca pada keputusan Aburizal Bakrie yang tetap yakin membela pasangan Capres dan Cawapres Prabowo dan Hatta Rajasa dalam pemilu 2014 yang pada saat itu Aburizal berdiri satu barisan dalam Koalisi Merah Putih (koalisi pendukung Prabowo-Hatta) dengan Suryadharma Ali (SDA).

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/5), menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013. Suryadharma, saat ditanya komentarnya, tak menyangka ia ditetapkan sebagai tersangka.

*Lead* menerangkan tentang penetapan tersangka Suryadharma Ali dalam kasus penyelenggaraan ibadah tahun 2012/2013.

*Narasumber* berita antara lain: Wakil Ketua KPK Busyro Moqoddas, Suryadharma Ali, Juru Bicara KPK Johan Budi, Ketua Umum Partai Golkar, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldin, Wakil Ketua Umum PAN Drajat H Wibowo.

b. Struktur Skrip,

1. *Who* Suryadharma Ali.
2. *What* Suryadharma Ali menjadi tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji.
3. *Where* rumah dinas SDA di Jakarta. *When* Kamis 22 Mei 2014.
4. *Why* Suryadharma diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus.
5. *How* Suryadharma menggunakan dana setoran awal ibadah haji yang dibayarkan masyarakat untuk keberangkatan ibadah haji pejabat Kementerian Agama dan keluarganya.

c. Struktur Tematik

Wartawan ingin penetapan tersangka Suryadharma Ali dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji, ketidaktahuan Suryadharma tentang penetapan dirinya sebagai tersangka

Ketika dimintai konfirmasi di rumah dinas di Jakarta Suryadharma Ali mengatakan, “saya belum tahu kalau pak busyro (muqoddas, wakil ketua kpk) yang kasih info, mungkin saja benar”.

Aburizal tetap yakin dukung Prabowo-Hatta.

Ditemui sebelum rapat pleno DPP Golkar, Kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyakini status tersangka dari Ketua Umum PPP, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, tidak akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

“ Insya Allah tidak. Tidak ada hubungannya (dengan pemilihan Prabowo-Hatta) dalam pilpres Juli 2014.” Ujar Aburizal sebelum mengawali rapat pleno yang mengandakan langkah-langkah Golkar untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

#### d. Struktur Retoris

Penekanan kata “Terkejut” dalam judul menerangkan Suryadharma Ali terkejut ketika tahu dirinya menjadi tersangka, kata Aburizal Bakrie “Yakin” dalam sub judul menjelaskan kalau, meskipun SDA (rekan satu koalisi) menjadi tersangka Aburizal tetap yakin mendukung Prabowo-Hatta. Gambar, penyidik KPK berjalan di lorong yang mengarah pada ruang kerja Suryadharma untuk melakukan penggeledahan.

*Grafik*, Kompas meletakkan berita tersebut di halaman pertama, menyajikan data kronologi kasus mulai dari 11 Februari tentang temuan PPTAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sampai penetapan menjadi tersangka 22 Mei 2014, serta data dugaan dan modus korupsi SDA.

Frame Kompas pada edisi pertama tentang dugaan kasus korupsi SDA, mengkonstruksikan berita tentang penetapan Suryadharma sebagai tersangka, serta ketidaktahuannya atas penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kompas dalam edisi tersebut juga menampilkan tanggapan dari Aburizal Bakri serta tokoh partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, terkait dengan pengaruh penetapan SDA sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai menteri terhadap pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hattarajasa. Aburizal dan SDA dalam Pemilu tahun 2014 berdiri dalam satu barisan koalisi KMP (Koalisi Merah Putih) dan bersama

mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta.

#### 4.1.2 Framing Kompas, 24 Mei 2014

**“SDA Belum Mau Lepas Jabatan”** Gerindra yakin pilihan ke Prabowo-Hatta Tak Terpengaruh.

##### a. Struktur Sintaksis

Judul berita “SDA Belum Mau Lepas Jabatan”. Kompas ingin menampilkan tentang sikap Suryadharma yang masih menjabat sebagai Menteri Agama dan masih terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2014, meskipun sudah berstatus tersangka kasus korupsi. Berbeda dengan judul utama, sub judul membahas tentang sikap partai Gerindra yang tetap yakin bahwa kasus SDA tidak mempengaruhi kubu Prabowo-Hatta.

Jakarta, KOMPAS – Menteri Agama Suryadharma Ali, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, belum terfikir untuk melepaskan jabatannya.

*Lead* mempertegas judul utama tentang sikap SDA. Suryadharma menyatakan belum berfikir melepaskan jabatannya sebagai menteri, ia belum memahami bagian-bagian mana yang menyebabkan dia menjadi tersangka, oleh karena itu dia akan menunggu proses hukum selanjutnya sembari berharap penetapannya sebagai tersangka hanya kesalahpahaman belaka.

**b. Struktur Skrip**

1. *Who* Suryadharma Ali,
2. *What* SDA belum ingin melepas jabatannya sebagai menteri meskipun berstatut tersangka.
3. *When* Jum'at 23 Mei 2014, *Where* di Kementerian Agama Jakarta.
4. *Why* Suryadharma belum memahami bagian-bagian mana yang menyebabkan dia menjadi tersangka.
5. *How* SDA masih menunggu proses hukum selanjutnya.

**c. Struktur Tematik**

Penulisan fakta oleh wartawan dalam menyajikan berita, mengambil beberapa sudut pandang berupa tema. *Pertama*, sikap SDA yang masih menjabat sebagai menteri meskipun sudah menjadi tersangka. *Kedua*, pandangan Partai Gerindra yang tetap yakin kasus SDA tidak berpengaruh pada pilihan Prabowo-Hatta. *Ketiga*, MUI menghimbau SDA mundur.

**d. Struktur Retorik**

Penekanan oleh Redaksi dalam menyajikan berita dengan melatakkannya di halaman pertama dengan dipertegas judul yang dicetak tebal. Ukuran font yang paling besar dibanding berita yang lain dalam satu halaman yang sama. Grafik menampilkan tabel sejumlah kasus di Kementerian Agama selain kasus SDA.

Frame Kompas pada edisi 24 Mei 2014, mengkonstruksi berita tentang sikap SDA yang belum melepaskan jabatannya sebagai Menteri Agama meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka



dugaan kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013. Wartawan selain menampilkan sikap SDA yang belum berfikir melepaskan jabatannya, Kompas juga menampilkan pendapat MUI yang menghimbau agar Suryadharma mundur dari jabatannya sebagai menteri, serta Kompas menyajikan tanggapan pasangan Prabowo yang menyatakan kasus SDA tidak mengganggu koalisi KMP yang dibangun.

Berbeda dengan Kompas, Di hari dan tanggal yang sama Koran Sindo tidak memberitakan kasus tersebut, meskipun Kompas menjadikan kasus tersebut sebagai berita utama yang diletakkan di halaman pertama.

#### **4.1.3 Framing Kompas, 28 Mei 2014**

##### **“Suryadharma Kirim Surat Mundur”**

###### **a. Struktur Sintaksis**

Penggunaan judul ingin menunjukkan tentang keputusan Suryadharma memilih mengundurkan diri, setelah bertahan dengan statusnya sebagai menteri meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berita ini juga menginformasikan tentang, keharusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menonaktifkan Suryadharma Ali sebagai menteri guna memperlancar proses hukumnya.

###### **b. Struktur Skrip**

1. *Who* Suryadharma Ali,

2. *What* Suryadharma mengirimkan surat pengunduran diri sebagai menteri,
  3. *When* Minggu 25 Mei 2014,
  4. *Where* Surabaya Jawa Timur,
  5. *Why* untuk memperlancar proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.
  6. *How* Presiden SBY harus menonaktifkan Suryadharma sebagai menteri.
- c. Struktur Tematik

“Hari Rabu,” jawaban Suryadharma Ali melalui layanan pesan singkat saat dihubungi *Kompas* di Jakarta, Selasa (27/5) siang, terkait dengan langkahnya untuk melayangkan surat pengunduran diri secara resmi kepada presiden.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan haji 2012/2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Suryadharma sempat menyatakan belum berfikir mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Dia juga masih akan mengambil peran dalam persiapan pelaksanaan ibadah haji 2014 (*Kompas*, 24/5).

Tema yang diangkat dalam berita ini adalah keputusan Suryadharma Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama serta keharusan Suryadharma Ali untuk segera berhenti sebagai menteri Agama guna untuk memperlancar proses hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Struktur Retorik

Wartawan memberi penekanan pada judul yang seolah ingin menunjukkan kepada pembaca, tentang sikap Suryadharma yang telah menyerah dan mengakui bahwa dirinya bersalah. Penonjolan paragraf

pertama yang menegaskan keharusan Presiden SBY untuk segera menonaktifkan Suryadharma.

Frame Kompas pada edisi 28 Mei 2014, mengkonstruksikan berita proses pengunduran diri Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama, lewat pengiriman surat mundur kepada presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang SDA temui langsung di Istana Bogor. Kompas selain menampilkan sikap SDA mundur sebagai Menteri Agama, juga menampilkan tanggapan Sekertaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang posisi Suryadharma sebagai Ketua Umum PPP yang akan ditentukan segera setelah dia mundur dari jabatannya sebagai menteri agama.

#### **4.1.4 Frame Kompas, 12 Juni 2014**

##### **“Suryadharma Ali Tetap Ketua Umum PPP”**

###### **a. Struktur Sintaksis**

Wartawan dalam berita ini menginformasikan tentang status Suryadharma yang masih duduk di posisi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) walaupun sudah berstatus tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama. Narasumber Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar.

Sumber berita diperoleh dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar,

Jakarta, Kompas – keinginan sejumlah pengurus wilayah Partai Persatuan Pembangunan agar Suryadharma Ali mundur dari jabatannya sebagai ketua umum belum dapat terpenuhi. Ini karena, sesuai dengan ketentuan, Suryadharma tetap menjadi ketua umum hingga masa jabatannya berakhir pada Muktamar PPP tahun 2014.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Rabu (11/6)

b. Struktur Skrip

1. *Who* Suryadharma Ali
2. *What* Suryadharma Ali masih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.
3. *When* Rabu 11 Juni 2014
4. *Where* Komplek Parlemen Senayan Jakarta
5. *Why* Suryadharma Ali masih akan tetap menjadi Ketua Umum PPP sesuai dengan ketentuan meskipun sudah berstatus tersangka kasus korupsi haji
6. *How* Suryadharma menunggu sampai Muktamar tahun 2015 untuk bisa lepas dari jabatannya sebagai ketua umum.

c. Struktur Tematik

Wartawan dalam berita tersebut mengambil tema tentang status Suryadharma yang tetap menjadi Ketua Umum PPP sampai Muktamar yang dilaksanakan tahun 2015.

d. Struktur Retoris

Wartawan menekan berita dengan menampilkan fakta AD/ART PPP yang menyebutkan Suryadharma terpilih sebagai Ketua Umum pada tahun 2011 dan akan berakhir masa jabatannya setahun setelah pelaksanaan Pemilu tahun 2014.

Frame Kompas pada edisi 12 Juni 2014, mengkonstruksikan berita kapasitas Suryadharma yang masih tetap menjadi Ketua Umum PPP meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus

korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012/2013. Wartawan dalam berita tersebut menampilkan alasan mengapa Suryadharma Ali masih menjabat sebagai Ketua Umum .

#### **4.1.5 Frame Kompas, 1 April 2015**

##### **“KPK Patahkan Dalil SDA”**

##### **Hari Ini, KY Panggil Advokat Hotma Sitompoel**

##### **a. Struktur Sintaksis**

Berita yang disusun tanpa dilengkapi gambar/foto sebagai penjabar namun cukup mendalam karena dilengkapi dengan lead, judul besar, dan sub judul menginformasikan tentang pernyataan Suryadharma Ali yang menganggap penetapan dirinya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang jelas telah dipatahkan KPK.

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, penetapan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan haji didasarkan sejumlah bukti permulaan yang cukup. KPK juga berpendapat, ganti rugi Rp 1 triliun yang dituntut Suryadharma tidak memiliki dasar hukum.

*Lead* KPK menganggap penetapan SDA sebagai tersangka korupsi didasarkan pada sejumlah bukti permulaan yang cukup. KPK juga berpendapat, ganti rugi 1 triliun rupiah yang dituntut Suryadharma tidak memiliki bukti.

Chatarina Mulyana Girsang, Kuasa Hukum KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didasarkan pada sejumlah bukti permulaan yang cukup serta berdasarkan dari 34 saksi dan 408 dokumen. Ditemukan pula indikasi kerugian negara 3,07 miliar rupiah dari proses penyelenggaraan

ibadah haji 2012 dan 2013 dan juga kerugian negara 1,83 triliun rupiah dari pengadaan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi.

b. Struktur Skrip

1. *Who* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. *What* KPK mematahkan dalil SDA tentang penetapan dirinya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat.
3. *When* Selasa 31 Maret 2015.
4. *Where* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. *Why* KPK menganggap penetapan SDA sebagai tersangka korupsi didasarkan pada sejumlah bukti permulaan yang cukup. KPK juga berpendapat, ganti rugi 1 triliun rupiah yang dituntut Suryadharma tidak memiliki bukti.
6. *How* penetapan tersangka Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didasarkan pada sejumlah bukti permulaan yang cukup serta berdasarkan dari 34 saksi dan 408 dokumen. Ditemukan pula indikasi kerugian negara 3,07 miliar rupiah dari proses penyelenggaraan ibadah haji 2012 dan 2013 dan juga kerugian negara 1,83 triliun rupiah dari pengadaan pemondokan jemaah haji di Arab Saudi.

c. Struktur Tematik

Wartawan menuliskan fakta dalam paragraf pertama setelah *lead* dan juga berfungsi sebagai penjelas serta penguat karena berisi hasil wawancara, fakta yang ditulis berdasarkan hasil wawancara

dengan Kuasa Hukum KPK yang ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta meletakkannya pada paragraf awal.

d. Struktur Retoris

Wartawan memberi penekanan dalam bentuk kata pada judul berita “Patahkan”, seolah ingin menunjukkan kalau dalil yang menjadi alasan Suryadharma untuk mengajukan permohonan praperadilan adalah tidak benar dan keliru, serta tuntutan nya atas KPK tidak berlandaskan hukum. Frame dari Kompas mengarah seolah media tersebut, mendukung KPK untuk segera membuktikan bahwa Suryadharma bersalah.

#### **4.1.6 Frame Kompas, 11 April 2015**

##### **“Suryadharma Ali Ditahan”**

a. Struktur Sintaksis

Berita disusun secara lengkap dengan gambar yang mempertegas judul, *lead* menjelaskan penahanan Suryadharma oleh KPK, headline, grafik kasus, serta grafik perjalanan kasus. Judul “Suryadharma Ali Ditahan” menginformasikan bahwa SDA sudah resmi ditahan KPK guna untuk mempermudah proses pemeriksaan. Berita disusun dengan model piramida terbalik.

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, Jum’at (10/4). Suryadharma ditahan setelah pada 22 Mei 2014 ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait dengan penyelenggaraan haji 2012/2013 dan 2010/2011.

Paragraf pertama menjelaskan langsung maksud dan tujuan berita, menginformasikan penahanan SDA serta perkembangan dari kasusnya. Dilanjutkan dengan pernyataan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK tentang alasan menahan SDA, Narasumber antara lain: Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, Suryadharma Ali.

b. Struktur Skrip

1. *Who* Suryadharma Ali
2. *What* Suryadharma menjadi tahanan KPK
3. *When* Jum'at 10 April 2015
4. *Where* lobi gedung KPK
5. *Why* SDA ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012/2013. Penahanan SDA merupakan bagian dari pelaksanaan janji KPK untuk mempercepat penanganan kasus korupsi besar yang menyita perhatian publik.
6. *How* Suryadharma ditahan setelah diperiksa selama enam jam, dia datang ke KPK pukul 10.30 didampingi pengacaranya Humprey Djemat, dan baru menjalani pemeriksaan selama satu jam kemudian. Saat keluar dari Lobi Gedung KPK pada 18.00, Suryadharma sudah mengenakan baju tahanan KPK.

c. Struktur Tematik

Wartawan menuliskan beberapa fakta, berupa hasil wawancara langsung dengan sumber yang terkait dengan berita kasus tersebut. Penulisan berita secara lengkap yang menyajikan beberapa fakta terkait dengan kasus diantaranya: alasan kenapa SDA harus ditahan,



tanggapan dan sikap Suryadharma yang menganggap penahanan dirinya tidak adil, serta tanggapan dari Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK. Tentang penahanan Suryadharma Ali. Selain Suryadharma masih ada tersangka lain yang akan dibidik dan diperiksa KPK.

d. Struktur Retorik

Wartawan memberi penekan berita penahanan Suryadharma Ali dengan menyertakan gambar dirinya mengenakan baju tahanan KPK, dari gambar yang ditampilkan seolah Kompas ingin menunjukkan sikap SDA seolah tidak menerima proses penahanan dirinya oleh KPK, dengan mengambil *angel* foto ekspresi/*gesture* wajah Suryadharma yang terlihat marah. Penekanan berita kasus korupsi SDA juga ditampilkan dalam bentuk grafik yang menyajikan kronologi/jejak kasus serta modus-modus kasus tersebut.

Frame Kompas dari beberapa pemberitaannya terkait dengan kasus korupsi Suryadharma Ali, memberitakan secara lengkap dimulai dari awal pentapannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji lengkap dengan grafik perjalanan kasus, pengunduran diri sebagai Menteri Agama melalui surat yang dikirim SDA langsung kepada Presiden, Proses praperadilan atas penetapan SDA sebagai merupakan kesalahan dan tidak memiliki bukti hukum yang jelas, serta penahanan SDA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna untuk memperlancar proses hukumnya. Kompas selain menjadikan Suryadharma Ali sebagai sumber utama dari berita-beritanya, juga menampilkan sikap dan

tanggapan-tanggapan tokoh dan kelompok politik yang memiliki kepentingan sama dan satu barisan dengan Suryadharma Ali.

## **4.2 Analisa Framing Berita Suryadharma Ali Pada Surat Kabar Harian Sindo Edisi Mei 2014-April 2015**

### **4.2.1. Frame Sindo, Edisi 27 Mei 2014**

#### **“Suryadharma Ali Mundur”**

##### **a. Struktur Sintaksis**

Wartawan dalam berita ini menginformasikan pengunduran diri Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012/2013. Wartawan menyusun berita secara lengkap ( isi berita, gambar, grafik) dan oleh redaksi di halaman utama sekaligus menjadi berita utama pada edisi 27 Mei 2014.

Bogor – Suryadharma Ali akhirnya mundur dari jabatannya sebagai menteri agama (menag) dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Langkah tersebut diambil setelah menjadi tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan haji.

Pada *Lead* wartawan menuliskan alasan Suryadharma lebih memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri pada masa Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua. Wartawan juga menyajikan grafik yang berisi kasus korupsi pada tahun 2014, Sudi Silalahi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan SDA menjadi narasumber pada berita tersebut.

##### **b. Struktur Skrip**

###### *1. Who* Suryadharma Ali

2. *What* SDA mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Agama.
3. *When* Senin 26 Mei 2014.
4. *Where* Isatana Bogor Jawa Barat.
5. *Why* Presiden meminta SDA megajukan surat pengunduran diri secara tertulis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan,
6. *How* SDA menyampaikan pernyataan pengunduran dirinya sebagai menteri kepada Presiden SBY di Istana Bogor.

c. Struktur Tematik

Suryadharma mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menag. Dia menuturkan alasan bahwa dengan status tersangka tersebut, dia khawatir akan mengganggu kinerja Kemenag dan KIB II secara keseluruhan.

Dia juga memutuskan mundur sebagai bagian dari etika, yakni harus fokus menghadapi masalah berat yang tengah dihadapi diri dan keluarganya. Dia pun menegaskan kedepannya menjalani hukum selanjutnya.

Wartawan menyajikan fakta yang berupa hasil wawancara dengan Suryadharma Ali, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi yang dimintai keterangan tentang keputusan pengunduran diri SDA, proses penyampaian keputusannya, serta tanggapan dan sikap Presiden SBY terkait dengan pengunduran SDA tersebut.

d. Struktur Retorik

Wartawan dalam berita tersebut ingin menekankan sikap Suryadharma yang bersedia mengundurkan diri sebagai Menteri Agama, bentuk penekanan terdapat pada posisi peletakan berita

sebagai headline foto berita yang menggambarkan dirinya menemui presiden dan sebagai bukti pelaksanaan perintah presiden yang meminta diri mengajukan pengunduran diri secara tertulis.

Wartawan ingin menampilkan tanggapan Suryadharma yang tidak merasa bersalah, serta pengunduran dirinya merupakan bagian dari etika. Penekanan dituliskan dalam bentuk kutipan wawancara dengan Mensesneg Sudi Silalahi yang berisi “Suryadharma tidak merasa bersalah dan laporan tentang kinerja di Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan perbaikan kinerja pelayanan haji dari tahun ke tahun”. Dari berita tersebut, Kompas seolah ingin membenarkan apa yang dilakukan Suryadharma Ali yang ingin mengundurkan diri menunggu proses hukum yang jelas, menunjukkan tanggapan SDA yang merasa dirinya tidak bersalah. Berbeda dengan pemberitaan yang dilakukan Kompas yang ingin menampilkan kepada pembaca bahwa SDA memang bersalah dan harus segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama.

#### **4.2.2. Frame Sindo, 28 Mei 2014**

##### **“KPK Bertekad Bongkar Kasus Haji”**

###### **a. Struktur Sintaksis**

Wartawan dalam berita tersebut menginformasikan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertekad ingin membongkar kasus haji hingga menyentuh jaringan mafia. Berita disusun dua halaman tanpa dilengkapi foto dan grafik, lead menjelaskan tentang tekad KPK yang akan membongkar kasus

tersebut serta mencari tersangka lain yang terlibat dengan kasus tersebut selain Suryadharma Ali. “KPK tetap membongkar secara menyeluruh kasus haji (termasuk mafia haji), kami masih fokus pada tersangka Suryadharma Ali yang menjabat sebagai menteri” kata Abraham kepada Koran Sindo.

b. Struktur Skrip

1. *Who* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. *What* KPK ingin membongkar kasus penyelenggaraan ibadah haji sampai menyentuh jaringan mafia,
3. *Why* kasus korupsi haji sama dengan karakter kasus korupsi yang lain, pelaku korupsi tidak tunggal. KPK mendalami dugaan keterlibatan pihak asing/ arab saudi dalam kasus ini.
4. *How* KPK tidak akan berhenti pada Menteri Suryadharma Ali, tapi akan mendalami dan melakukan pengembangan siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat.

c. Struktur Tematik

Wartawan menuliskan hasil wawancara sebagai sumber fakta pada paragraf kedua yang merupakan hasil wawancara langsung dengan Ketua KPK Abraham Samad, dilanjutkan ke paragraf ketiga. Paragraf keempat berisi hasil wawancara dengan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas yang menyatakan ”kasus korupsi haji karakternya sama dengan kasus korupsi yang lain”. Berita tersebut mengusung tema bahwa tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012/2013 bukan hanya Suryadharma Ali.

d. Struktur Retorik

”KPK tidak akan berhenti pada menteri Suryadharma Ali” wartawan ingin menekankan bahwa tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya Suryadharma Ali, akan tetapi masih ada keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. ”hingga menyentuh jaringan mafia” KPK bertekad membongkar secara menyeluruh kasus haji (termasuk mafia haji).

**4.2.3. Frame Sindo, Edisi 29 Mei 2014**

**”KPK Pastikan Kasus Haji Akan Ada Tersangka Lain”**

a. Struktur Sintaksis

Berita pada edisi 29 Mei 2014 merupakan berita lanjutan dari berita edisi sebelumnya, menginformasikan siapa-siapa saja yang menjadi tersangka lanjutan menyusul Suryadharma Ali pada kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Berita disusun juga tanpa tambahan foto berita, lead dan grafik, hanya berisi judul, berita dan hasil wawancara dari berbagai sumber.

Narasumber dalam berita ini antara lain: Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang mengungkapkan, ”cukup gamblang kan ada Anggota DPR, ada pejabat lain. Nah, itu tunggu saja tanggal mainnya, yang pasti SDA nggak sendirian”.

Adnan menandakan, dalam melakukan pendalaman dan pengembangan perkara, KPK melihat proses tender pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji seperti katering, pemondokan dan transportasi. KPK tidak memandang apakah anggota DPR yang bermain dalam penyelenggaraan haji dan tendernya berasal dari komisi VIII atau tidak.

b. Struktur Skrip

1. *Who* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. *What* KPK memastikan kasus haji akan ada tersangka lain selain SDA. Where gedung KPK Jakarta,
3. *Why* ada tersangka lain pada kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan penggunaan dana haji lebih dari 1 triliun rupiah di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran (TA) 2012 /2013. Selain mantan menteri Suryadhrama Ali, pihak yang bakal menjadi tersangka antara lain berasal dari komisi VIII (DRP dan pejabat diksar Kemenag).
4. *How* dalam melakukan pendalaman dan pengembangan perkara, KPK melihat proses tender pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan haji seperti katering, pemondokan dan transportasi. KPK tidak memandang apakah anggota DPR yang bermain dalam penyelenggaraan haji dan tendernya berasal dari komisi VIII atau tidak.

c. Struktur Tematik

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja yang mengungkapkan, "Cukup gamblang kan ada Anggota DPR, ada pejabat lain. Nah, itu tunggu saja tanggal mainnya, yang pasti SDA nggak sendirian".

Wartawan menuliskan fakta, Suryadharma Ali bukanlah satu-satunya tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012/2013.

d. Struktur Retorik

Wartawan ingin menekankan bahwa tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya Suryadharma Ali, akan tetapi masih ada keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

#### 4.2.4. Frame Sindo, Edisi 1 April 2015

##### ”Suryadharma Ali Tuntut KPK Rp 1 Triliun”

###### a. Struktur Sintaksis

Jakarta – tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 201-2013 Suryadharma Ali (SDA) menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengganti rugi atas penetapan dirinya sebagai tersangka.

*lead* dalam berita ini wartawan menginformasikan Suryadharma Ali menuntut balik Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar satu triliun rupiah, terkait dengan keputusan KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji TA 2012/2013. Berita ini disusun tanpa didukung dengan foto berita serta grafik sebagai pelengkap.

Wartawan menyusun berita dengan dua sudut yang berbeda, yaitu dari sudut pandang pihak SDA dan pihak KPK. Pihak SDA menampilkan hasil wawancara dengan kuasa hukumnya Humphrey Djemat, yang menyatakan bahwa perbuatan termohon (KPK) yang menetapkan pemohon (SDA) sebagai tersangka tanpa prosedur adalah sebagai tindakan atas perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Karena cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian 1 triliun rupiah. Dari pihak KPK menanggapi pernyataan kuasa hukum SDA mengenai tuntutan 1 triliun tersebut dengan diwakili Anggota Tim Biro Hukum KPK Chatarina M Girsang



mengatakan bahwa pemohon dianggap mengada-ada mengenai tuntutan yang diajukan, Chatarina mengungkapkan bahwa sesuai dengan praperadilan maka tuntutan ganti rugi hanya berkisar antara 1-3 juta rupiah.

b. Struktur Skrip

1. *What* Suryadharma Ali
2. *What* Suryadharma Ali menuntut KPK sebesar 1 triliun rupiah terkait dengan penetapan SDA sebagai tersangka.
3. *Where* Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
4. *Why* perbuatan termohon (KPK) yang menetapkan pemohon (SDA) sebagai tersangka tanpa prosedur adalah sebagai tindakan atas perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Karena cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan kerugian 1 triliun rupiah. Penetapan tersangka atas SDA tidak sejalan dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU20/2001 tentang perubahan UU31/1999 *jo* pasal 55 ayat 1 KUHP *jo* pasal 63 KUHP. Pasal itu menyatakan bahwa untuk menjatuhkan status tersangka kepada seseorang harus disertai dengan adanya alat bukti yang kuat, sedangkan penetapan tersangka SDA tanpa adanya alat bukti yang kuat. Oleh karena itu penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat.
5. *How* melalui permohonan praperadilan yang disampaikan kuasa hukum SDA di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

c. Struktur Tematik

Wartawan dalam berita tersebut ingin menuliskan fakta tentang pendapat Suryadharma Ali yang merasa dirugikan dengan keputusan Komisi pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji. Dengan menampilkan hasil pernyataan dari para kuasa hukum SDA tentang kesalahan KPK dalam penetapan kliennya sebagai tersangka pada paragraf awal, kedua dan ketiga yang mana ketiga paragraf tersebut saling berkaitan dan mendukung.

d. Struktur Retorik

Kata tuntutan dalam judul mempertegas tujuan berita dituliskan, untuk mengisahkan penuntutan Suryadharma Ali terhadap KPK sebesar satu triliun rupiah. Wartawan seolah ingin menampilkan tindakan Suryadharma, yang berani menuntut KPK karena menetapkan SDA sebagai tersangka tanpa ada alat bukti yang jelas dan melanggar pasal 2 ayat 1 tentang penjatuhan tersangka kepada seseorang.

Meskipun menampilkan dua sudut pandang yang berbeda dalam penyajian dan pencarian informasinya. Koran Sindo terkesan lebih cenderung menonjolkan fakta tentang keharusan KPK mengganti rugi atas penetapan Surydharma sebagai tersangka.

Frame Koran Sindo dari beberapa berita terkait dengan dugaan kasus korupsi Suryadarma Ali, Sindo mengawali pemberitaan dalam edisi cetaknya pada tanggal 27 Mei 2014 dengan judul pertama

”Suryadharma Ali Mundur”. Berbeda dengan Kompas yang memulai berita pertama terkait dengan kasus tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 yang merupakan tanggal pertama SDA ditetapkan sebagai tersangka. Intensitas pemberitaan dari Sindo lebih jarang yang hanya membeberitakan empat kali pemberitaan selama bulan Mei 2014- April 2015, berbeda dengan Kompas yang membeberitakan sebanyak enam kali. Koran Sindo dalam menyajikan berita lebih sering menampilkan sumber informasi pihak-pihak yang pro dengan Suryadharma Ali dan meletakkannya pada paragraf awal. Berbeda dengan Kompas yang menampilkan sumber informasi terkait dengan tanggapan dan pengaruh kasus SDA terhadap kepentingan orang-orang yang berhubungan dengan Suryadharma.

#### **4.3. Pemberitaan Kompas dan Sindo tentang SDA Bila Ditinjau Dari Sudut Pandang Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Orang islam dianjurkan untuk selektif ketika menikmati dan menyikapi sebuah berita yang datang kepadanya, agar tidak terjebak dalam kepentingan yang merugikan. Begitu juga KPI yang mengedepankan nilai islam dalam mempelajari dan mempraktekkan komunikasi dan menyiarkan dakwah islam melalui media. KPI juga harus selektif dalam mengakses informasi dan menyajikan berita yang benar-benar objektif agar tidak merugikan saudara muslim lainnya pada khususnya serta penikmat media pada umumnya.

KPI dalam tujuannya mencetak jurnalis-jurnalis islam, maka dalam kegiatan jurnalistiknya harus sesuai dengan etika dan kode etik sebagai

jurnalis islam. Jurnalis Islam dapat dirumuskan dengan suatu proses meliputi, mengolah dan menyebarkan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan ajaran Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam, serta berbagai pandangan dengan perspektif ajaran Islam kepada khalayak melalui media massa (Romli, 2003:34).

Karena jurnalistik Islam adalah jurnalistik dakwah, maka setiap jurnalis muslim, yakni wartawan dan penulis yang beragama Islam, berkewajiban menjadikan jurnalistik Islam sebagai "ideologi" dalam profesinya. Jurnalis muslim adalah sosok juru dakwah (da'i) di bidang pers, yakni mengemban dakwah bil qalam (dakwah melalui pena dan tulisan).

Bila ditinjau dari sudut pandang Komunikasi Penyiaran Islam pemberitaan dari Kompas terkait dengan kasus korupsi Suryadharma Ali merupakan pemberitaan yang harus dipahami lebih dalam agar tidak terjebak oleh pemahaman yang sepihak. Dalam pemberitaan tersebut yang diberitakan adalah seorang muslim yang juga berstatus sebagai Menteri Agama.

Kompas yang seakan ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa SDA telah menjadi tersangka, SDA harus segera mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri, mengapa SDA masih menjadi Ketua Umum partai padahal sudah berstatus tersangka. Status tersangka adalah status yang berarti seseorang belum pasti bersalah, karena masih menjalani proses pengadilan hingga sampai pada tahap pendakwaan yang menjadikan seorang benar-benar bersalah. Sedang sindo dalam memberitakan kasus tersebut menampilkan tanggapan serta bukti bahwa Suryadharma bukan satu-satunya yang bersalah dalam kasus tersebut.

Suryadharna juga berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya yang menganggap penetapan dirinya sebagai tersangka merupakan kesalahan, karena tidak memiliki alat bukti yang jelas serta tidak menyebutkan berapa kerugian yang dialami negara dalam kasus tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian dengan judul “Pemberitaan Kasus Korupsi Suryadharma Ali Dalam Surat Kabar Harian Kompas Dan Sindo”, merupakan penelitian yang ingin mencari bagaimana konstruksi berita kasus korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 terkait dana pemondokan, katering, dan transportasi yang dilakukan oleh Suryadharma Ali, dalam pemberitaan Surat Kabar Harian Kompas dan Surat Kabar Harian Sindo.

Proses pengolahan data dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan alat analisis framing dengan model framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam model ini mereka membagi empat struktur besar yaitu: Sintaksi, Skrip, Tematik, Dan Retorik sebagai perangkat utama analisis untuk mengetahui kecenderungan dan kecondongan wartawan dalam mengemas berita atas suatu peristiwa atau kejadian.

Framing (bingkai) kedua media Kompas dan Koran Sindo dari beberapa berita yang diteliti, menunjukkan arah kecenderungan dan konstruksi fakta yang berbeda. Kompas mengkonstruksikan berita, kaintannya dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012/2013. Suryadharma Ali adalah tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012/2013, SDA harus segera melepaskan jabatannya sebagai Menteri Agama guna untuk memperlancar proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Suryadharma masih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meskipun statusnya menjadi tersangka dugaan kasus korupsi.

Kompas dalam mengonstuksikan berita sebagaimana yang dilihat dari struktur retorik selalu memberikan penekanan dalam setiap beritanya, baik itu dalam kata “Suryadharma Terkejut”, “Suryadharma Belum Mau Lepas Jabatan”, “Suryadharma Ali Tetap Ketua Umum PPP”. Maupun berbentuk foto berita yang menunjukkan ekspresi marah Suryadharma saat ditahan KPK.

Berbeda dengan Kompas, Koran Sindo mengkonstruksikan pemberitaan yang seolah menunjukkan bahwa Suryadharma Ali bukan satu-satunya tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. belum pasti bersalah, karena pemberitaan Sindo hanya berhenti pada proses Praperadilan dan pemberitaan penahanan SDA oleh KPK tidak dimunculkan. Struktur retorik, Koran Sindo lebih sering menggunakan kata yang mendukung SDA, seperti pada judul “SDA tuntutan KPK Rp1 triliun” yang menjelaskan bahwa penetapan SDA sebagai tersangka karena unsur politik karena telah mendukung Calon Presiden Prabowo-Hatta pada Pemilu 2014, serta tidak memiliki bukti yang kuat. Sedangkan Kompas pada hari yang sama menggunakan judul “KPK Patahkan Dalil SDA” yang berisi tentang keberhasilan KPK mematahkan tuntutan SDA terhadap KPK.

Dalam intensitas pemberitaan kasus tersebut Koran Sindo lebih sedikit mengeluarkan berita dibanding dengan Kompas. Konstruksi yang berbeda terlihat jelas dalam setiap pemberitaan dan fakta-fakta yang ditampilkan dalam berita.

## **5.2. Saran**

Pemabaca sebagai objek dari pemberitaan media, agar lebih selektif dalam menyikapi ketika datang sebuah berita dan mengakses segala informasi agar nantinya tidak terjebak dalam kepentingan yang bisa merugikan.

Media dalam mengeluarkan sebuah informasi harus objektif, tidak berpihak pada kepentingan manapun. Serta lebih bisa menjaga prinsip independen yang dijunjung tinggi para jurnalis.

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), penelitian analisis media dengan objek pemberitaan media cetak Koran Kompas dan Sindo untuk beberapa tahun kedepan kurang efektif selama Koran Kompas dalam pemberitaannya masih merujuk pada ideologi *Humanisme Transendental* dan Koran Sindo pemiliknya masih terikat dengan kepentingan politik.

### **5.3. Penutup**

Sujud syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Amiin.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Salam, 2005. *Berita Pelanggaran Partai Politik dalam Pemilu 2004 Pada Media Lokal (Studi analisis Framing Terhadap Pelanggaran Partai Golkar, PDIP, dan PAN Dalam Pemilu 2004 Pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Periode Maret 2004)*. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Darmanto, 2006,.*Pemberitaan Media Massa tentang Pengakuan Lembaga Internasional, Worldhelp yang Membawa 300 Anak Korban Bencana Alam Tsunami di Aceh (Analisis Framing Harian Sindo dan Kompas)*. Skripsi Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo, Semarang.
- Deftiawan, Agung, 2010. *Konstruksi Pemberitaan Harian Kompas Tentang Kasus-Kasus Korupsi Edisi April 2008*. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Depag RI, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Eriyanto, 2002. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, LKis Yogyakarta.
- Hamad, Ibnu, 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa : Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, Jakarta : Granit.
- <http://print.kompas.com/about/sejarahkompas.html> (Diakses tanggal 18 Januari 2014).
- <http://profile.print.kompas.com/profil/>, (Diakses, 16 Juni 2015)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas\\_\(surat\\_kabar\)#Penghargaan\\_dan\\_Rekor](http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat_kabar)#Penghargaan_dan_Rekor) (Diakses tanggal 18 Januari 2014).
- <http://id.wikipedia.org/koransindo>, akses 26/05/2015
- <http://kompasgramedia.com/about-kg/vision-mission-values>, (Diakses 16 Juni 2015)
- Kadewandana, Donie, 2008. *Konstruksi Realitas Di Media Massa, skripsi*, Jakarta.
- Kasman, Suf. 2010. *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia (Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika)*. Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kompas, *Suryadharma Ali Terkejut*, edisi 23 Mei 2014
- \_\_\_\_\_, *SDA Belum Mau Lepas Jabatan*, edisi 24 Mei 2014
- \_\_\_\_\_, *Suryadharma Kirim Surat Mundur*, edisi 28 Mei 2014
- \_\_\_\_\_, *Suryadharma Ali Tetap Ketua Umum PPP*, edisi 12 Juni 2014
- \_\_\_\_\_, *KPK Patahkan Dalil SDA*, edisi 1 April 2015
- \_\_\_\_\_, *Suryadharma Ali Ditahan*, edisi 11 April 2015
- Koran Sindo, *Suryadharma Ali Mundur*, edisi 27 Mei 2014
- \_\_\_\_\_, *KPK Bertekad Bongkar Kasus Haji*, edisi 28 Mei 2014
- \_\_\_\_\_, *KPK Pastikan Kasus Haji Akan Ada Tersangka Lain*, edisi 29 Mei 2014
- \_\_\_\_\_, *Suryadharma Ali Tuntut Kpk Rp 1 Triliun*, edisi 1 April 2015

- Kuswandi, Wawan, 1996. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Miskiyya, Richa. 2011. Orientasi Pengembangan Wacana Pemberitaan Tentang KH. Abdurrahman Wahid (Studi Analisis Pemberitaan SKH Kompas Edisi Januari 2010 ). (Tidak Dipublikasikan. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo).
- Moleong, Lexy J, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ngatmin, Marlina, 2007. *Analisis Framing Kasus Poligami KH. Abdullah Gymnastiar di Media Kompas dan Sindo*. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Noeh, Munawar Fuad, 2005. *Kiai Di Republik Maling*, Jakarta: Penerbit Republika.
- Nova, Firsan, 2009. *Crisis Public Relation*, Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, Bimo, dkk. 1999. Politik Media Mengemas Berita. Jakarta : ISAI.
- Nuruddin, 2004. Sistem Komunikasi Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Samantho, 2002. *Jurnalistik Islami: Panduan Praktis bagi para aktifis Muslim*, Jakarta, Harakah.
- Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKiS.
- Romli, Asep Syamsul M. 2005. *Jurnalistik Praktis*, Bandung: Rosda Karya
- Setiawan, Ebta. 2010. "Pengertian Konstruksi" Kbbi offline versi 1.1.
- Setiawan, Ebta. 2010. "Pengertian Pemberitaan" Kbbi offline versi 1.1.
- Sobur, Alex, 2002, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, Bandung, Remaja Rosda Karya
- Sumandiria, As Haris, 2005. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triana, Aziz , 2014. *Pemberitaan Tentang Dugaan dan bantahan Kasus Korupsi Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Di Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Harian Kompas Dan Republika*. Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Totok, Djuroto, 2000. *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung Rosdakarya.
- Umar, Musni, 2004. *Korupsi Musuh Bersama*, Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi.
- Wahyudi, J.B. 1991. *Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Penerbit alumni. Cetakan Pertama.
- Wibowo, Wahyu. 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zachrie, Ridwan, dkk, 2010. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia : Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andini, Raiza, "KPK Eksekusi 38 Kasus Korupsi Sepanjang 2014" <http://news.okezone.com/read/2014/12/29/337/1085402/kpk-eksekusi-38-kasus-korupsi-sepanjang-2014>, (diunduh 15 april 2015).
- Anonim, "Suryadharna Ali", [http://id.wikipedia.org/wiki/Suryadharna\\_Ali](http://id.wikipedia.org/wiki/Suryadharna_Ali), (diunduh 15 april 2015).

Huda, Mas Alamil, “Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai 37 Triliun”,  
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/17/nafz0b-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-37-triliun>, (diunduh 15 april 2015).

Prabowo, Dani, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Suryadharma Ali,  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/11230341/Hakim.Tolak.Gugatan.Praperadilan.Suryadharma.Ali>, (diunduh 15 april 2015).